

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BALI 2019



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BALI 2019

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BALI 2019

ISBN : 978-602-1393-70-3
Katalog : 4102002.51
No. Publikasi : 51550.2018
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi + 80 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Dicetak oleh :

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BALI 2019

Penanggung Jawab:

Hanif Yahya, S.Si, M.Si.

Penanggung Jawab Teknis:

Kadek Muriadi Wirawan, SE, M.Si

Koordinator:

Ni Luh Putu Dewi Kusumawati, SST, M.Si

Anggota:

Ni Luh Putu Dewi Kusumawati, SST, M.Si

Ketut Ksama Putra, SST

Layout:

Ketut Ksama Putra, SST

Cover:

Ketut Ksama Putra, SST

KATA PENGANTAR

Berbagai indikator pengukuran proses pembangunan telah banyak disusun oleh para ahli. Dari yang awalnya berfokus hanya kepada ekonomi, sampai akhirnya disusun indikator yang menitikberatkan pada manusia itu sendiri, karena disadari bahwa manusia merupakan hulu dan sekaligus hilir pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang disusun untuk tujuan tersebut. Walau saat ini berkembang indikator-indikator komposit lainnya, IPM tetap memiliki tempat untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan dilihat dari tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat suatu wilayah. Pernah mengalami penyesuaian metodologi penghitungan pada tahun 2010, diharapkan IPM menjadi indikator yang cukup sensitif untuk mengukur pembangunan manusia.

Kali ini, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali kembali meluncurkan buku kedua yaitu Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali 2019. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan makna dan manfaat untuk semua pengguna data. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Denpasar, November 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali

Hanif Yahya, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xv
Bab 1 Pembangunan Manusia Sebagai Tujuan	
1.1 Hakikat Pembangunan Manusia	1
1.2 SDGs dan Pembangunan Manusia	6
1.3 Pembangunan Manusia dalam Rencana Pembangunan Daerah	8
Bab 2 Pencapaian Pembangunan Manusia	
2.1 Pembangunan Manusia di Bali Terus Mengalami Kemajuan	15
2.2 Perbandingan Antarwilayah Se-Jabalnusra	21
2.3 Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota	26
2.4 Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota	30
Bab 3 Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia Provinsi Bali	
3.1 Hidup Lebih Lama dan Kesehatan yang Lebih Baik	37
3.2 Pendidikan Memperluas Peluang	45
3.3 Peningkatan Standar Hidup Layak	47
Bab 4 Disparitas Pembangunan Manusia	
4.1 Disparitas Pembangunan Manusia di Provinsi Bali	53
4.2 Komponen Pembangunan Manusia Tertinggi dan Terendah	64
4.3 Disparitas Pembangunan Manusia di Wilayah Sarbagita dan Non-Sarbagita	66
4.4 Disparitas Pembangunan Manusia Berdasarkan Gender	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	15
Tabel 2.2	Capaian IPM dan Komponen IPM Bali, 2019	17
Tabel 2.3	Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Bali, 2019	26
Tabel 4.1	Delapan Kabupaten/Kota dengan Komponen Pembangunan Manusia Tertinggi dan Terendah, 2019	65

<https://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	7
Gambar 2.1	Perkembangan IPM Bali, 2015-2019	18
Gambar 2.2	Umur Harapan Hidup Bali, 2015-2019	19
Gambar 2.3	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Bali, 2015-2019	20
Gambar 2.4	Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Bali (Perkapita/Tahun), 2015-2019 (juta rupiah)	21
Gambar 2.5	IPM di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2019	22
Gambar 2.6	Umur Harapan Hidup di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2019	23
Gambar 2.7	Harapan Lama Sekolah di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2019	24
Gambar 2.8	Rata-rata Lama Sekolah di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2019	25
Gambar 2.9	Pengeluaran perkapita di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2019	26
Gambar 2.10	IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia	27
Gambar 2.11	IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2019.....	28
Gambar 2.12	Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bali, 2017-2019	29
Gambar 2.13	Perubahan Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Bali, 2015-2019	30
Gambar 2.14	Tingkatan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2019	31
Gambar 2.15	Tingkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2019	32
Gambar 2.16	Tingkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2019	33
Gambar 2.17	Tingkatan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2019	34
Gambar 3.1	Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)	38
Gambar 3.2	Indikator Lingkungan Bali, 2019	40

Gambar 3.3	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan di Bali, 2015-2019	43
Gambar 3.4	Jumlah Konsumsi Rokok perkapita Sebulan di Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2019 (batang)	44
Gambar 3.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Bali, 2015-2019 (persen).....	46
Gambar 3.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Bali, 2015-2019	46
Gambar 3.7	Angka Partisipasi Murni (APM) Bali, 2015- 2019 (Persen).....	47
Gambar 3.8	Tren Kemiskinan di Bali Menurut Perkotaan dan Perdesaan, 2015-2019 (Persen)	48
Gambar 3.9	Tren Gini Rasio Bali Menurut Perkotaan dan Perdesaan di Bali, 2015-2019	49
Gambar 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali, 2015-2019 (Persen)	50
Gambar 4.1	Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2015-2019	54
Gambar 4.2	Rata-rata Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bali, 2015-2019	55
Gambar 4.3	Selisih UHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2015-2019	56
Gambar 4.4	Rata-rata Pertumbuhan UHH Kabupaten/Kota di Bali, 2015-2019	57
Gambar 4.5	Selisih HLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2015-2019	59
Gambar 4.6	Rata-rata Pertumbuhan HLS Kabupaten/Kota di Bali, 2015-2019	60
Gambar 4.7	Selisih RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Bali, 2015-2019	61
Gambar 4.8	Rata-rata Pertumbuhan RLS Kabupaten/Kota di Bali, 2015-2019	62
Gambar 4.9	Selisih PPP Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2015-2019	63
Gambar 4.10	Rata-rata Pertumbuhan PPP Kabupaten/Kota di Bali, 2015-2019	64
Gambar 4.11	Perbandingan IPM Wilayah Sarbagita dengan NonSarbagita di Provinsi Bali, 2019	67
Gambar 4.12	Perbandingan IPM Wilayah Sarbagita dengan NonSarbagita di Provinsi Bali Menurut Status, 2019	68

Gambar 4.13 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Bali, 2015-2019	70
---	----

<https://bali.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2019	75
Lampiran 2	Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2015-2019	76
Lampiran 3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2019	77
Lampiran 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2017	77
Lampiran 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2016	78
Lampiran 6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2015	78
Lampiran 7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2015	79

BAB 1

Pembangunan Manusia Sebagai Tujuan

01

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran komprehensif mengenai **tingkat pencapaian pembangunan manusia** sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan suatu negara/daerah.

02

IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam **tiga dimensi dasar pembangunan** yaitu kesehatan, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak.

03

Dimensi kesehatan diukur dari **UHH**, dimensi pengetahuan diukur dari **RLS** dan **HLS**, serta dimensi standar hidup layak diukur dari **Pengeluaran Per Kapita**.

04

IPM menjadi salah satu alokator penentuan **Dana Alokasi Umum (DAU)**.

BAB 1


PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI TUJUAN

1.1 Hakikat Pembangunan Manusia

Sebelum gagasan Amartya Sen (pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi) tentang hakikat pembangunan, keberhasilan pembangunan suatu negara hanyalah difokuskan pada perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional. Pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada penambahan kapital atau modal, penambahan pendapatan dan laju pertumbuhan. Alih-alih berharap *trickledown effect* bekerja dengan sendirinya, kesenjangan ekonomi antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah kian timpang. Hal ini tidaklah mengherankan, karena tambahan nilai tambah yang tercipta pada sirkulasi ekonomi suatu wilayah tentunya lebih banyak dihasilkan oleh pemilik modal besar. Sehingga tercipta kondisi “yang kaya semakin kaya dan yang miskin tambah miskin”.

Gagasan Amartya Sen pada dekade 1990 an, yang memfokuskan pada pembangunan manusia, karena hakikat pembangunan semestinya adalah bagaimana masyarakatnya dapat mengakses lebih besar ke pengetahuan, kesehatan yang lebih baik, kebebasan memilih mata pencaharian yang lebih baik, keamanan, dan kebebasan untuk berbudaya dan berpolitik. Kemudian, muncullah berbagai diskusi mengenai isu ini dikarenakan makin banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi disertai dengan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, dan masalah sosial lainnya yang berhubungan dengan manusia.

UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990 akhirnya menerbitkan laporan *Human Development Report 1990*. Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa tujuan utama dari pembangunan adalah



untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur Panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus merupakan *input* pembangunan. Konsep pembangunan manusia mencakup dimensi yang luas dan melibatkan berbagai sektor kehidupan. Menganggap manusia sebagai asset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan menjadi ide dasar pembangunan manusia.

Pencapaian kesejahteraan manusia secara utuh dan komprehensif menstimulasi pendekatan pembangunan manusia tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, namun juga memfokuskan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Karena itu, pembangunan manusia seyogyanya lebih mengedepankan sisi manusianya dibanding pertumbuhannya.

Memposisikan manusia sebagai tujuan utama pembangunan mendorong transformasi fokus program prioritas nasional, yaitu dari *national income accounting* menjadi *people-centered policies*. Terjadinya pergeseran tersebut menyebabkan indikator pertumbuhan ekonomi disinyalir belum sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara paripurna. Dibutuhkan indikator lain untuk melengkapi potret pembangunan manusia dari berbagai aspek lain.

Salah satu tolok ukur capaian pembangunan manusia dari beberapa aspek dijelaskan melalui Indeks Pembangunan Manusia/*Human Development Index (IPM/HDI)*. Indikator ini dikembangkan kali pertama oleh ekonom asal Pakistan, Mahbub ul Haq, pada tahun 1990. Dalam perkembangannya, IPM semakin menjadi perhatian pemerintah di berbagai belahan dunia karena


beberapa alasan. Setidaknya jika diuraikan, terdapat beberapa alasan utama pendorong IPM begitu diperhatikan.

IPM merupakan suatu indeks komposit yang terangkum dari pendekatan tiga dimensi dasar manusia, meliputi umur panjang dan sehat (sebagai ukuran *longevity*), pengetahuan/pendidikan (sebagai ukuran *knowledge*), dan standar hidup layak/tingkat pendapatan riil (sebagai ukuran *living standards*). Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita.

Sejak diperkenalkan pada tahun 1990, metode penghitungan IPM telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 2010, *UNDP* merevisi metode penghitungan IPM secara mendasar. Indikator melek huruf diganti dengan indikator harapan lama sekolah. Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita digantikan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Demikian halnya dengan metode agregasi pembentukan IPM yang mengalami penyempurnaan. Jika semula metode penghitungan menggunakan rata-rata aritmatik, diubah menjadi rata-rata geometrik.

Di Indonesia sendiri, IPM telah dirilis sejak tahun 1996 dengan periode berkala tiga tahunan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan pemerintah terutama terkait dengan penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), mulai tahun 2004, IPM telah dihitung setiap tahun. Sejak tahun 2014, metode penghitungan IPM di Indonesia telah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh *UNDP* dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita digunakan sebagai proksi penghitungan PNB yang belum tersedia di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Beberapa sumber data yang dijadikan dasar pijakan penghitungan IPM di Indonesia antara lain, hasil Sensus Penduduk dan Proyeksi Penduduk



untuk menghitung umur harapan hidup saat lahir serta hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk menghitung angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Data-data tersebut dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi penyedia data di Indonesia.

1.2 SDGs dan Pembangunan Manusia

Menyadari peranan IPM sebagai salah satu indikator capaian kualitas pembangunan manusia, ketiga dimensi pembentuknya niscaya terus diupayakan peningkatannya secara kontinu. Usaha peningkatan capaian IPM selaras pula dengan *road map* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Mengingat bahwa investasi pada *human development* menjadi salah satu kunci upaya percepatan pencapaian tujuan SDGs pada tahun 2030 secara keseluruhan.

SDGs yang disahkan dalam Sidang Umum PBB tahun 2015 berpegang pada prinsip *No One Left Behind*, bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Pelaksanaan agenda SDGs selama 15 tahun berlandaskan pada tiga pilar dengan 17 tujuan (*goals*) yang hendak dicapai. Dari kesemua tujuan tersebut, terdapat beberapa *goals* yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dari uraian tujuan tersebut, nyata bahwa pembangunan


manusia merupakan bagian penting dari program pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Diuraikan lebih rinci, pada tujuan ketiga khususnya target 3.1, tertulis komitmen untuk menurunkan kematian hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Harapannya, kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun dapat diakhiri. Target ini berkaitan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, yaitu umur harapan hidup saat lahir. Jika angka kematian neonatal dapat ditekan, akan berimbas pada peningkatan umur harapan hidup saat lahir.

Pada tujuan keempat khususnya target 4.1, dinyatakan komitmen untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas sehingga mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Apabila target ini dapat tercapai, HLS dan RLS yang merupakan indikator penyusun IPM akan ikut meningkat. Peningkatan angka kelulusan



pendidikan dasar dan menengah akan berdampak pada peningkatan HLS. Dalam jangka panjang, RLS juga akan ikut meningkat karena peningkatan kapasitas pendidikan dasar dan menengah.

Pada tujuan kedelapan di target 8.1, dinyatakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) minimal tujuh persen per tahun di negara-negara berkembang. Implikasi target ini adalah meningkatkan PNB per kapita. Dengan peningkatan PNB per kapita, secara tidak langsung akan menaikkan pengeluaran per kapita yang merupakan salah satu indikator pembentuk IPM. Pada target 8.3, setiap negara mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dengan tingkat pendapatan yang lebih baik bagi semua. Pada gilirannya, peningkatan tingkat pendapatan akan berdampak pada bertambahnya pengeluaran per kapita meski secara tidak langsung.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa melalui pencapaian target SDGs, tujuan pembangunan manusia dapat tercapai. Semakin nyata, bahwa tujuan pembangunan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia.

1.3 Pembangunan Manusia dalam Rencana Pembangunan Daerah

Pembangunan manusia menjadi salah satu isu penting dalam program prioritas pembangunan nasional. Dalam Nawacita khususnya butir kelima ditegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam RPJMN 2015-2019, dinyatakan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup manusia dilaksanakan melalui empat sub agenda prioritas, yaitu pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pembangunan pendidikan khususnya melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar, pembangunan kesehatan khususnya melalui

pelaksanaan Program Indonesia Sehat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja.

Sejalan dengan program dan visi misi pemerintah pusat, demikian halnya dengan program kerja Pemerintah Provinsi Bali. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019, dijabarkan visi, misi, dan agenda program prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Pola Pembangunan Semesta Berencana, yaitu suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sekala niskala* menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 22 misi pembangunan Bali dan 5 bidang program prioritas. Dari 22 misi tersebut, ada beberapa misi yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Beberapa diantaranya dirinci sebagai berikut:

▪ **Bidang Kesehatan:**

Misi ke-3: Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan *database* riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.

▪ **Bidang Pendidikan:**

Misi ke-4: Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

▪ **Bidang Pendapatan Masyarakat:**

Misi ke-8: Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.

Misi ke-16: Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.

Misi ke-17: Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding Bali*) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.

Sejalan dengan visi misi pembangunan Bali yang telah diuraikan sebelumnya, arah kebijakan dan pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah mencakup 5 bidang, yaitu:

- Bidang 1: Pangan, Sandang, dan Papan
- Bidang 2: Kesehatan dan Pendidikan
- Bidang 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Bidang 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya
- Bidang 5: Pariwisata

Pembangunan manusia dalam program prioritas tersebut, antara lain dituangkan pada program kedua yang meliputi kesehatan dan pendidikan.

▪ **Bidang Pendidikan:**

1. Persiapan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun,
2. Persiapan pelaksanaan program Pendidikan berbasis keagamaan di Desa Adat, Pendidikan PAUD/TK, Dasar dan Menengah,
3. Persiapan pendirian akademi komunitas di Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem (Pendidikan Vokasi),
4. Pengembangan pendidikan SMK 4 tahun (setara diploma I),
5. Pengembangan pendidikan SMK Kewirausahaan,
6. Menyiapkan SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
7. Menyiapkan program kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri,
8. Pembentukan Tim Penyusun Pengembangan SDM Bali Unggul,
9. Penyusunan pedoman pelaksanaan PPDB tahun 2019.

▪ **Bidang Kesehatan:**

1. Membentuk Tim Pengkajian Jaminan Kesehatan yang diterapkan dengan JKBM dan JKN menuju sistem jaminan yang baru,
2. Membentuk Tim Standarisasi Pelayanan Kesehatan,
3. Membentuk Tim Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Usada Bali),
4. Peningkatan kualitas Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) menjadi RS Internasional,
5. Menyiapkan program pendidikan dokter spesialis anak dan kandungan.

BAB 2

Pencapaian Pembangunan Manusia Bali



BAB 2

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA


2.1. Pembangunan Manusia di Bali Terus Mengalami Kemajuan

Capaian pembangunan manusia dapat digambarkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui IPM, dapat dijelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM menjadi salah satu data strategis. Selain menjadi ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Capaian IPM di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan menjadi empat kelompok. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 2.1. Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi



Berdasarkan capaian IPM Bali tahun 2019, pembangunan manusia di Bali tercatat berada pada level “tinggi” dengan capaian 75,38. Angka ini meningkat sebesar 0,61 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Bali tahun 2019 tercatat tertinggi kelima secara nasional, berada di bawah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau.

Dirinci menurut capaian masing-masing komponen pembentuk IPM, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✓ Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) tercatat 71,99 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,99 tahun atau lebih lama 0,31 tahun dibandingkan tahun 2018.
- ✓ Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat 13,27 tahun. Artinya, anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,27 tahun atau setingkat perguruan tinggi semester tiga atau tamat diploma satu. HLS tahun 2019 tercatat lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun 2018.
- ✓ Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercatat 8,84 tahun. Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,84 tahun atau setara SMP tingkat dua (kelas VIII). RLS tahun 2019 tercatat lebih lama 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
- ✓ Pengeluaran per kapita disesuaikan tercatat sebesar 14,15 juta rupiah/orang/tahun. Artinya, pada tahun 2019 masyarakat Bali memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 14,15 juta rupiah/orang/tahun atau meningkat 260 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari capaian masing-masing komponen penyusun IPM, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2019, kualitas kesehatan, pendidikan, dan

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Bali mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

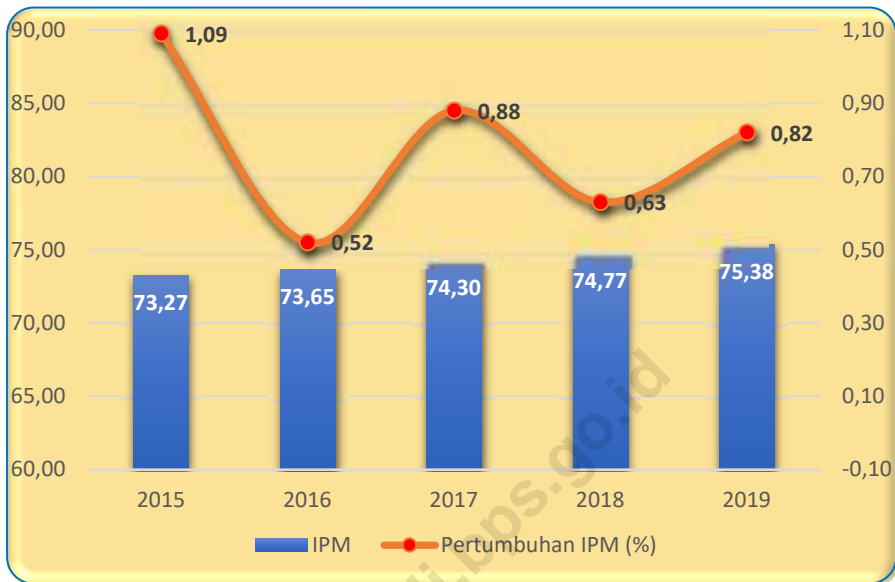
Tabel 2.2. Capaian IPM dan Komponen IPM Bali, 2019

Komponen	Nilai
 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	71,99
 Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,27
 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,84
 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun)	Rp 14.146.000,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,38

Sumber: BPS Provinsi Bali

Selain mencermati capaian di satu titik waktu tertentu, menelaah lebih jauh perkembangan antarwaktu dapat menambah cakrawala pengetahuan terkait kondisi pembangunan manusia di suatu wilayah. Berdasarkan data perkembangan IPM Bali pada kurun waktu tahun 2015-2019, tercatat bahwa setiap tahun pembangunan manusia di Bali mengalami kemajuan. Kondisi ini tergambar dari grafik capaian IPM. Pada tahun 2015, IPM Bali tercatat 73,27 dan terus meningkat hingga mencapai 75,38 pada tahun 2019. Menilik dari sisi pertumbuhan IPM, selama periode lima tahun tersebut secara rata-rata tumbuh 0,79 persen per tahun dan selalu berada pada level “tinggi”. Pada periode tahun 2018-2019, IPM Bali tercatat tumbuh 0,82 persen. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Provinsi Bali.

Gambar 2.1. Perkembangan IPM Bali, 2015-2019

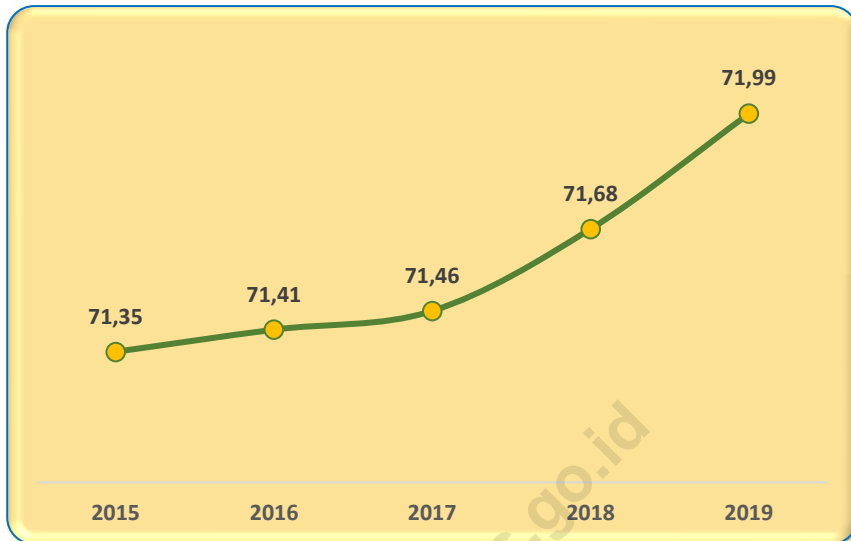


Sumber: BPS Provinsi Bali

Pencapaian kapabilitas dasar pada pembangunan manusia dalam IPM diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan capaian IPM tentunya merupakan hasil dari peningkatan capaian setiap komponennya.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). UHH merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah terkait ketersediaan sarana prasarana, kemudahan akses pelayanan kesehatan, maupun kualitas kesehatan. Mencermati perkembangan pada kurun waktu tahun 2015-2019, Bali tercatat mampu meningkatkan UHH sebesar 0,64 tahun atau rata-rata tumbuh 0,22 persen per tahun.

Gambar 2.2. Umur Harapan Hidup Bali, 2015-2019

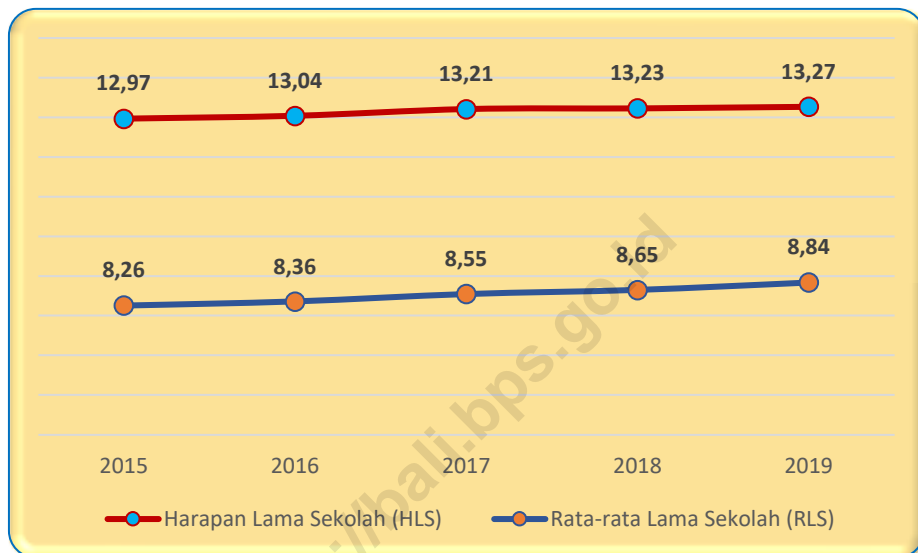


Sumber: BPS Provinsi Bali

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan kedua indikator tersebut selama kurun waktu tahun 2015-2019 tercatat terus meningkat. Dalam kurun lima tahun, HLS tercatat meningkat 0,30 tahun, sedangkan RLS tercatat meningkat 0,58 tahun. Peningkatan tersebut menjadi sinyal positif semakin baiknya tingkat pendidikan di Provinsi Bali. Dengan semakin banyaknya anak bersekolah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi niscaya akan berdampak pada perbaikan modal dasar kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bali. Salah satu aspek yang dinilai melemahkan daya saing SDM Bali adalah rendahnya indeks pendidikan. Meski terus meningkat, seyogyanya upaya lebih keras dan lebih cepat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dibanding provinsi lain. Menilik salah satu indikator pendidikan, misalnya RLS, DKI Jakarta tercatat

11,06 tahun, Kepulauan Riau 9,99 tahun, Maluku 9,81 tahun, Kalimantan Timur 9,70 tahun, dan Sumatera Utara 9,45 tahun.

Gambar 2.3. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Bali, 2015-2019



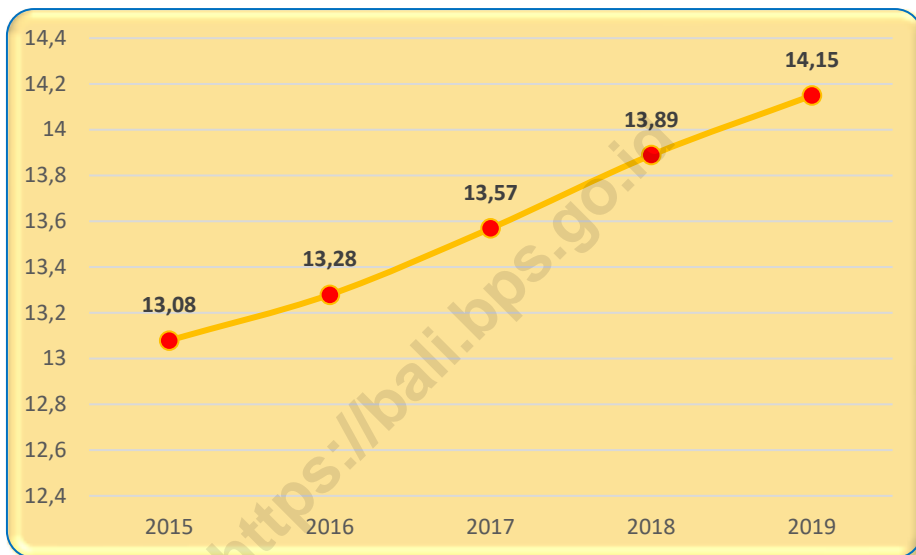
Sumber: BPS Provinsi Bali

Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh indikator pengeluaran per kapita. Indikator tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Untuk menjaga keterbandingan antarwilayah, dilakukan standardisasi menggunakan konsep *purchasing power parity* (PPP): satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat tercatat meningkat sebesar 1,07 juta rupiah atau secara rata-rata tumbuh 1,97 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan pada tahun

2018 dengan 2,31 persen dan terendah pada tahun 2016 dengan pertumbuhan 1,54 persen. Sebagai catatan, pengeluaran per kapita yang digunakan adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antarwilayah (pengeluaran per kapita disesuaikan).

Gambar 2.4. Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Bali (perkapita/tahun), 2015-2019 (juta rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Bali

2.2. Perbandingan Antarwilayah Se-Jabalnusra

Melengkapi analisis keterbandingan antarwaktu, perbandingan antarwilayah dapat menjadi gambaran lain akan perkembangan pembangunan manusia di Provinsi Bali. Mengingat posisi geografis Bali yang terletak di kawasan tengah Indonesia, perkembangan IPM Bali akan disandingkan dengan provinsi-provinsi yang berada dalam kelompok Jabalnusra atau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat,

dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ditampilkan pula posisi capaian IPM Bali dibandingkan dengan nasional.

Gambar 2.5. IPM di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2019



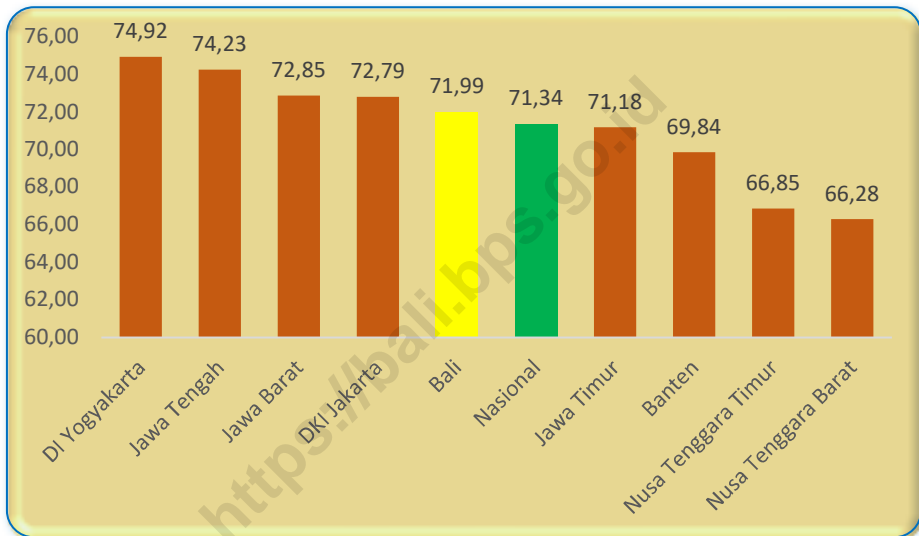
Sumber: BPS Provinsi Bali

IPM Bali tahun 2019 tercatat menjadi tertinggi ketiga di antara sembilan provinsi se-Jabalnusra. Peringkat pertama dicapai oleh DKI Jakarta dengan IPM 80,76, sedangkan terendah di Nusa Tenggara Timur dengan IPM 65,23. Capaian IPM di antara provinsi se-Jabalnusra juga semakin menguatkan adanya kesenjangan hasil pembangunan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Dibandingkan dengan nasional, IPM Bali tercatat masih berada di atas angka nasional yang tercatat 71,92.

Menilik dimensi kesehatan yang ditunjukkan melalui indikator UHH saat lahir, UHH tahun 2019 untuk Provinsi Bali berada pada peringkat kelima se-Jabalnusra. Berada di bawah DI Yogyakarta (74,92 tahun), Jawa Tengah (74,23 tahun), Jawa Barat (72,85 tahun), dan DKI Jakarta (72,79 tahun). Selisih

antara UHH DI Yogyakarta (yang juga merupakan UHH tertinggi di Indonesia) dan Bali sekitar 2,93 tahun. Meski UHH Bali masih berada sedikit di atas rata-rata nasional, tentu diharapkan perbaikan kualitas kesehatan terutama untuk bayi, balita, dan anak-anak dapat terus ditingkatkan. Pada gilirannya, akan ikut memperpanjang UHH di masa mendatang.

Gambar 2.6. Umur Harapan Hidup di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2019

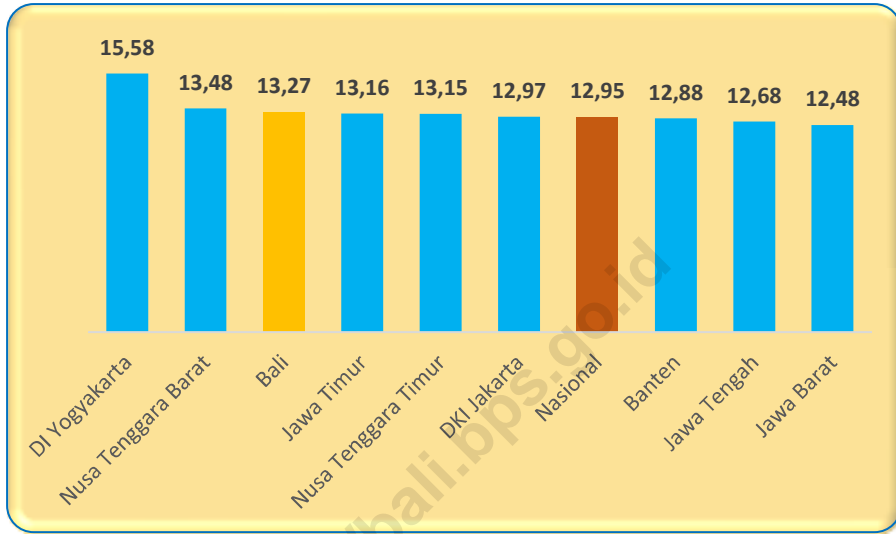


Sumber: BPS Provinsi Bali

Pada dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS Bali tahun 2019 tercatat 13,27 tahun dan berada pada peringkat ketiga se-Jabalnusra, di bawah DI Yogyakarta (15,58 tahun) dan Nusa Tenggara Barat (13,48 tahun). HLS Bali masih berada di atas angka nasional yang tercatat 12,95 tahun. Demikian halnya dengan RLS Bali tahun 2019 yang juga tercatat berada pada peringkat ketiga se-Jabalnusra dengan RLS selama 8,84 tahun. RLS Bali berada di bawah

DKI Jakarta (11,06 tahun) dan DI Yogyakarta (9,38 tahun). Capaian RLS Bali tahun 2019 masih berada di atas RLS Nasional yang tercatat 8,34 tahun.

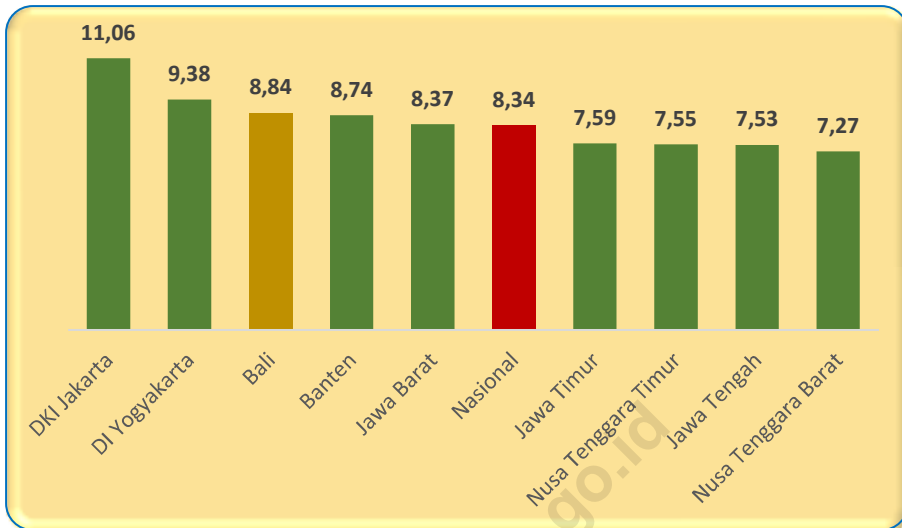
Gambar 2.7 Harapan Lama Sekolah di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2019



Sumber: BPS Provinsi Bali

Namun, menarik pula mencermati perbandingan antara HLS dan RLS beberapa provinsi di Indonesia. Bila dilihat dari RLS, Provinsi NTT dan NTB merupakan dua provinsi dengan capaian RLS cukup rendah se-Jabalnusra, masing-masing selama 7,55 tahun dan 7,27 tahun atau setingkat SMP kelas 1. Namun untuk HLS, provinsi NTB dan NTT justru tercatat mempunyai HLS cukup tinggi dan berada di atas angka nasional. Kondisi ini memberi sinyal masih ada ketimpangan antara realita lapangan dengan ekspektasi yang ada. Meski demikian, dengan tingginya HLS besar peluang untuk menggenjot peningkatan RLS, tidak hanya di kawasan timur Indonesia, tetapi termasuk di kawasan tengah seperti Bali.

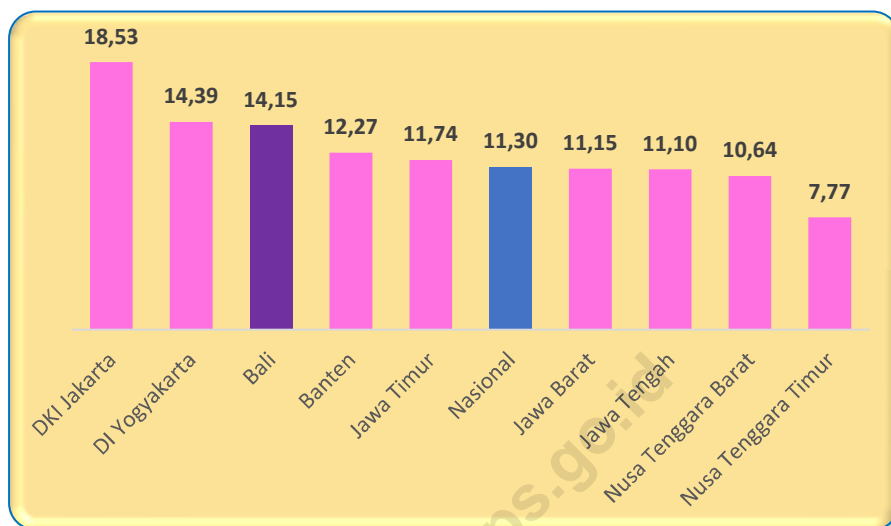
Gambar 2.8 Rata-rata Lama Sekolah di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2019



Sumber: BPS Provinsi Bali

Dimensi standar hidup layak diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP) Bali tahun 2019 tercatat menempati urutan ketiga terbesar se-Jabalnusra dan keempat terbesar secara nasional. Menilik pengeluaran per kapita tertinggi se-Jabalnusra termasuk dalam lingkup nasional yang dihasilkan di DKI Jakarta, yaitu sebesar 18,53 juta rupiah dan terendah yaitu Nusa Tenggara Timur yang tercatat sebesar 7,77 juta rupiah sekaligus menjadi kedua terendah secara nasional, menunjukkan masih lebarnya rentang ketimpangan pembangunan manusia dipandang dari sisi ekonomi.

Gambar 2.9 Pengeluaran per Kapita di Jabalnusra Menurut Provinsi, 2019



Sumber: BPS Provinsi Bali

2.3. Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Kemajuan pembangunan manusia dapat ditinjau dari sisi capaian status maupun kecepatan pertumbuhan IPM. Mencermati pencapaian di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2019 dari sisi capaian status ditampilkan sesuai Tabel 2.3 dan Gambar 2.10.

Tabel 2.3 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Bali, 2019

Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Kota Denpasar	Gianyar	Bangli	-
Badung	Tabanan	Karangasem	
	Jembrana		
	Buleleng		
	Klungkung		

Sumber: BPS Provinsi Bali

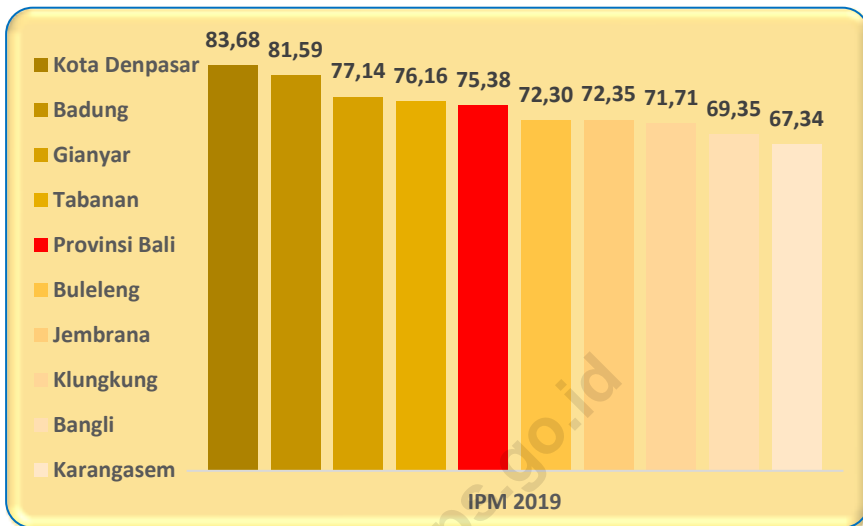
Pencapaian pembangunan manusia tahun 2019 di level kabupaten/kota terlihat masih cukup bervariasi. Meski tidak ada yang berada pada status rendah, masih ada dua kabupaten yang berada pada level sedang. Pada lain sisi, ada pula dua kabupaten/kota yang telah berada pada level sangat tinggi. IPM tertinggi pada tahun 2019 tercatat pada Kota Denpasar (83,68) diikuti oleh Kabupaten Badung (81,59). Keduanya menjadi kabupaten/kota dengan capaian sangat tinggi. Sebagai catatan, Kota Denpasar sejak tahun 2012 tercatat IPM berstatus sangat tinggi, sedangkan Kabupaten Badung baru tiga tahun belakangan. Pada kelompok capaian tinggi, tercatat terdapat lima kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar (77,14), Kabupaten Tabanan (76,16), Kabupaten Jembrana (72,35), Kabupaten Buleleng (72,30), dan Kabupaten Klungkung (71,71). Dua kabupaten yang tercatat masih berada pada kategori capaian IPM sedang adalah Kabupaten Bangli (69,35) dan Kabupaten Karangasem (67,34).

Gambar 2.10. IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2019



Sumber: BPS Provinsi Bali

Gambar 2.11. IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2019



Sumber: BPS Provinsi Bali

Selain dari sudut status capaian IPM, perkembangan pembangunan manusia dapat pula dilihat dari sudut kecepatan pertumbuhan. Selama tahun 2018-2019, tercatat semua kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan IPM. Pada periode tersebut, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Karangasem (1,28%), diikuti oleh Kabupaten Klungkung (1,14%), dan Kabupaten Jembrana (0,98%). Pada sisi lain, pertumbuhan terlambat tercatat di Kota Denpasar (0,46%), diikuti Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli, masing-masing 0,56% dan 0,57%. Dari laju pertumbuhan IPM di kabupaten/kota tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kabupaten/kota yang telah mencapai IPM yang tinggi bahkan sangat tinggi akan cenderung lebih melambat dalam pertumbuhannya meski tetap dimungkinkan terus meningkat. Demikian pula sebaliknya, kabupaten dengan capaian IPM sedang terhitung lebih mampu tumbuh lebih cepat. Tentu harapannya, pertumbuhan untuk kabupaten-kabupaten dengan capaian IPM

sedang masih dapat lebih terakselerasi sehingga mampu setara dengan capaian IPM kabupaten/kota lain dengan status IPM tinggi atau sangat tinggi.

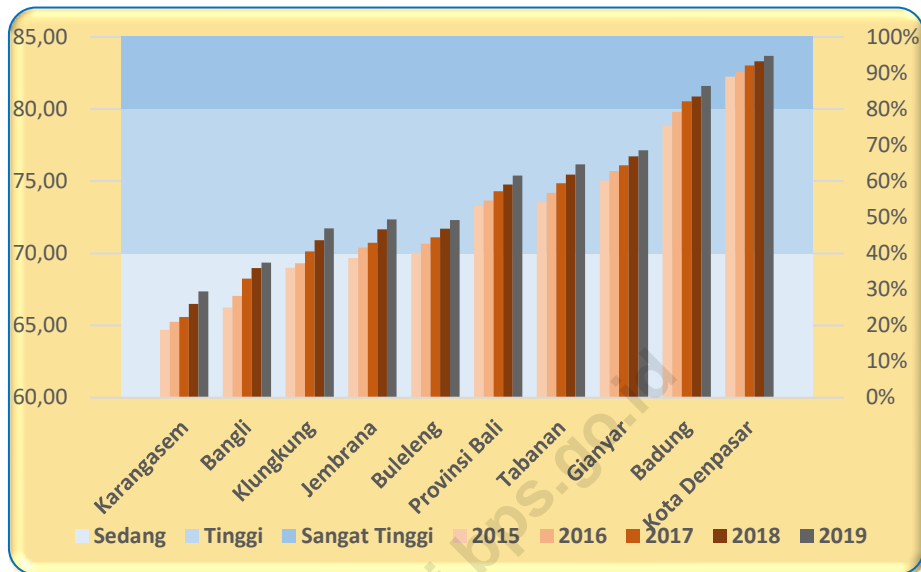
Gambar 2.12. Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bali, 2018-2019



Sumber: BPS Provinsi Bali

Meninjau perubahan status pembangunan manusia di Provinsi Bali pada periode tahun 2015-2019, tercatat ada beberapa kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan pencapaian IPM ke tingkatan status yang lebih tinggi. Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Badung berhasil meningkatkan status IPM ke satu level di atasnya. Kabupaten Badung tercatat berhasil meningkat dari status tinggi ke sangat tinggi. Faktor yang menjadi pembeda peningkatan tersebut adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini dipengaruhi oleh kecepatan pertumbuhan yang mampu dihasilkan dari proses pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota.

Gambar 2.13. Perubahan Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Bali, 2015-2019



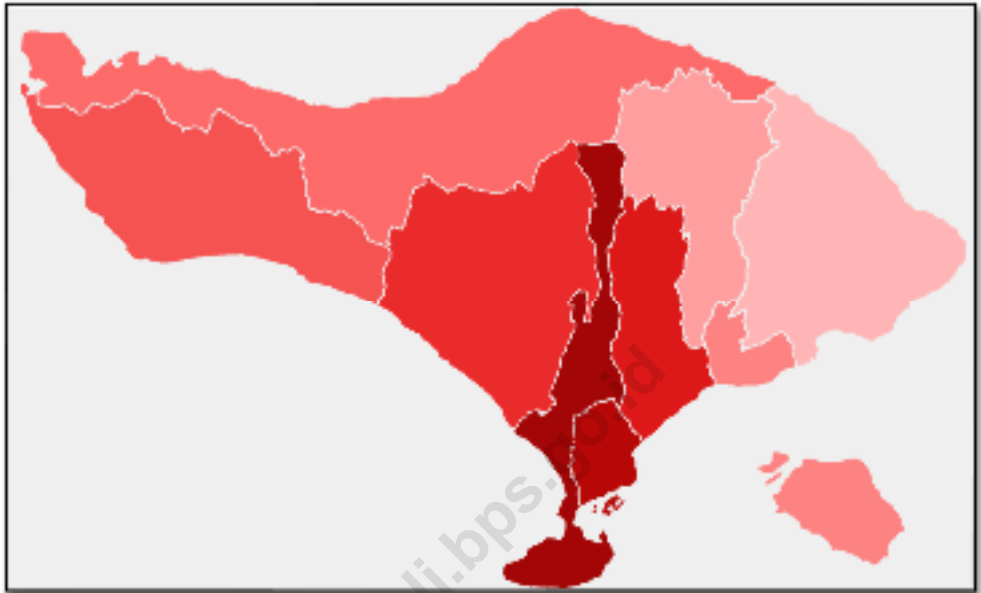
Sumber: BPS Provinsi Bali

2.4. Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Mencermati lebih rinci pembangunan manusia di kabupaten/kota menurut dimensi dan capaian komponen-komponen penyusun IPM disajikan dalam pokok bahasan berikut ini.

Pembangunan manusia pada dimensi umur panjang dan hidup sehat mencatat UHH tertinggi dicapai oleh Kabupaten Badung dengan UHH 74,99 tahun dan terendah di Kabupaten Karangasem dengan UHH 70,35 tahun. Namun, dilihat dari sisi kecepatan pertumbuhan UHH, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Kabupaten Klungkung (0,51%). UHH Kabupaten Bangli mampu tumbuh 0,46 persen atau 0,32 poin dibandingkan tahun 2018. Kabupaten Buleleng tercatat tumbuh 0,45 persen atau naik 0,32 poin dibanding tahun 2018, sedangkan Kabupaten Badung tercatat sebagai kabupaten dengan pertumbuhan UHH terendah yaitu tumbuh 0,37 persen atau naik 0,28 poin.

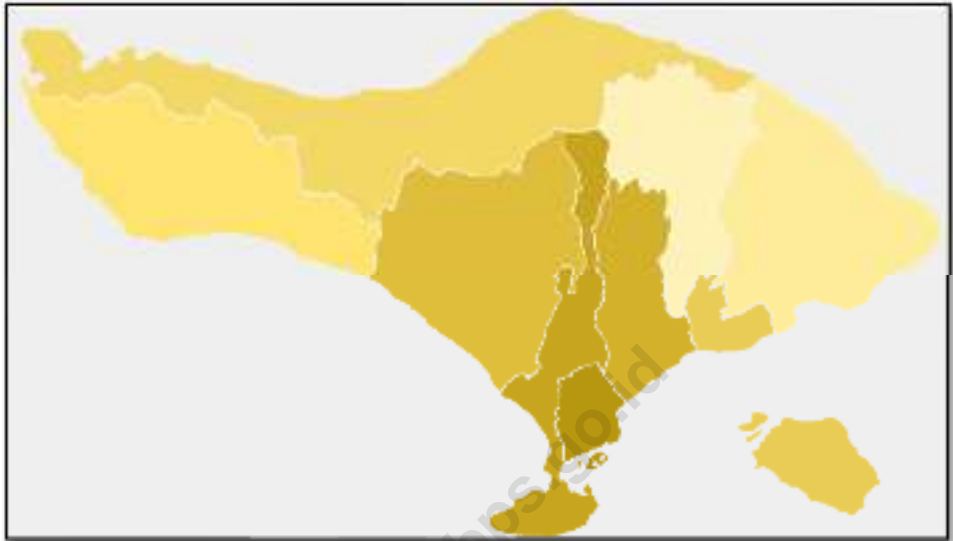
Gambar 2.14. Tingkatan Umur Harapan Hidup (UHH)
Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2019



Sumber: BPS Provinsi Bali

Untuk dimensi pendidikan, HLS tertinggi tercatat di Kota Denpasar (13,99 tahun) dan terendah di Kabupaten Bangli (12,33 tahun). Kecepatan pertumbuhan HLS tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Gianyar (0,66%). Kota Denpasar tercatat tumbuh 0,07 persen atau naik 0,01 poin dibanding tahun 2018, begitupula dengan Kabupaten Karangasem tercatat tumbuh 0,08 persen atau naik 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya.

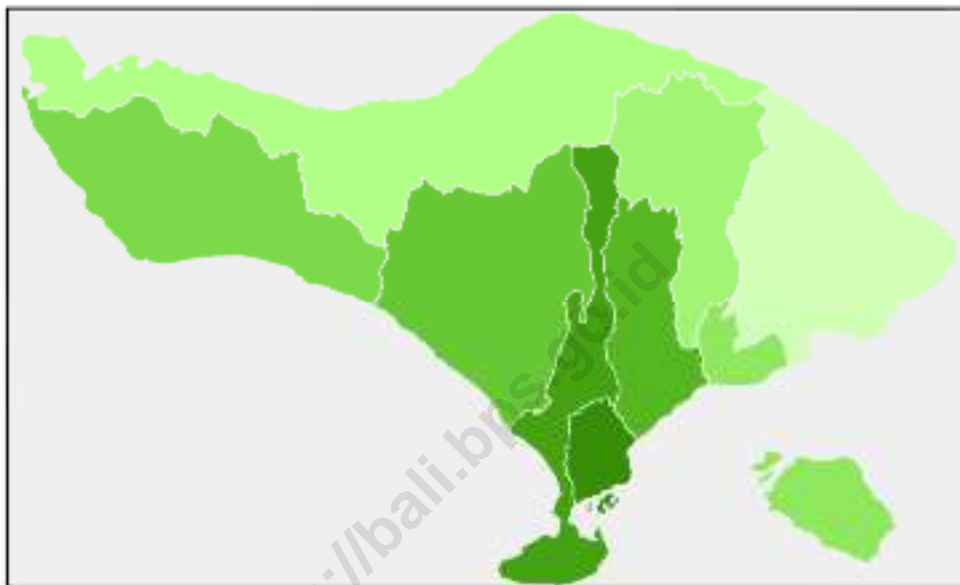
Gambar 2.15. Tingkatan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2019



Sumber: BPS Provinsi Bali

Untuk RLS tertinggi dicatatkan Kota Denpasar, yakni selama 11,23 tahun dan terendah selama 6,31 tahun tercatat di Kabupaten Karangasem. Jarak RLS tertinggi dan terendah tahun 2019 sebesar 4,92 tahun. Ketimpangan RLS ini sudah makin menurun, yang sebelumnya jaraknya tercatat sebesar 5,19 tahun. Dengan kata lain, pada tahun 2019 rata-rata penduduk berumur 25 tahun ke atas di Kota Denpasar telah menempuh pendidikan hingga jenjang SMA kelas II (tingkat XII), sedangkan penduduk di Kabupaten Karangasem rata-rata telah menamatkan jenjang SD. Kecepatan pertumbuhan tertinggi tercatat di Kabupaten Karangasem (5,70%), meningkat 0,34 poin dan terendah tercatat di Kabupaten Gianyar (0,22%), meningkat 0,02 poin dibanding tahun 2018. Meski Kabupaten Karangasem telah mencatatkan pertumbuhan tertinggi, patut disadari bahwa tetap diperlukan upaya keras untuk mengejar ketertinggalan RLS tersebut.

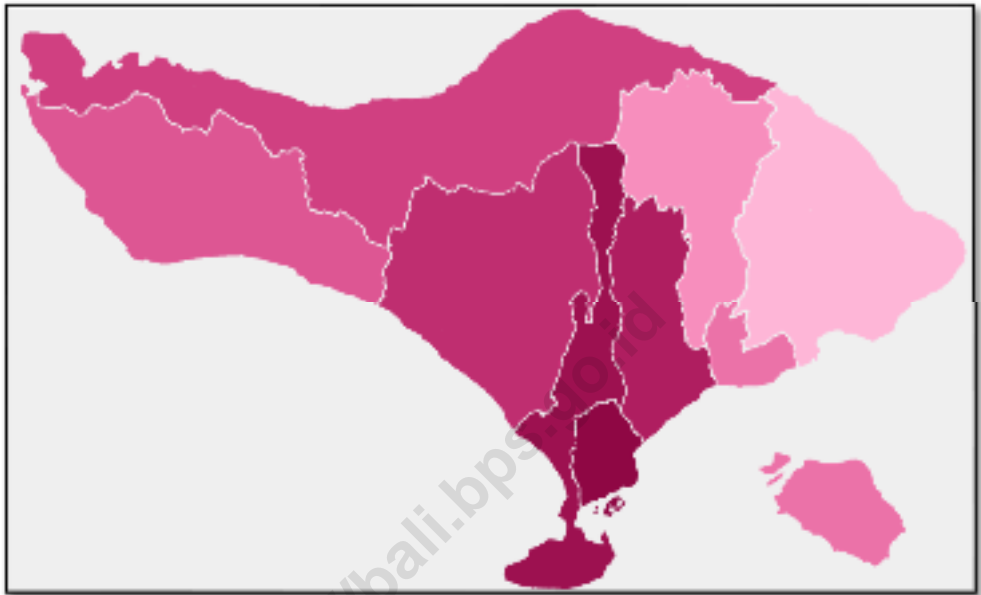
Gambar 2.16. Tingkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2019



Sumber: BPS Provinsi Bali

Pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran perkapita tertinggi dihasilkan di Kota Denpasar (19,99 juta rupiah per tahun) dan terendah di Kabupaten Karangasem (10,30 juta rupiah per tahun). Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Buleleng dengan peningkatan sebesar 4,12 persen atau meningkat sebesar Rp545 ribu. Pertumbuhan terbesar berikutnya dicatatkan oleh Kabupaten Tabanan yang mampu tumbuh 2,55 persen atau meningkat sebesar Rp363 ribu, sedangkan pertumbuhan pengeluaran perkapita terendah pada tahun 2019 dicatatkan oleh Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 1,47 persen, yang pada tahun 2018 sempat mencatatkan pertumbuhan tertinggi se-Bali yaitu sebesar 2,84 persen.

Gambar 2.17. Tingkat Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2019



Sumber: BPS Provinsi Bali

Sebagai catatan, gradasi warna pada peta tematik berurutan dari warna paling gelap ke warna paling terang menunjukkan urutan capaian tiap-tiap komponen penyusun IPM dari yang paling tinggi ke paling rendah.

BAB 3

Peningkatan *Kapabilitas* Dasar *Manusia* Provinsi Bali

71,99 tahun

UHH

8,84 tahun

RLS

HLS

13,27 tahun

PPP

14,15
juta rupiah

BAB 3

PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA PROVINSI BALI

Setelah selesai berfokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah saat ini berkonsentrasi terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan capaian pembangunan manusia nampaknya menjadi prioritas utama di semua kementerian. Hal ini terlihat wajar karena pemerintah ingin memanfaatkan bonus demografi yang sedang berjalan. Kesempatan ini dirasakan menjadi kesempatan emas namun dari sudut berbeda bisa menjadi tantangan yang besar. Kondisi ini bisa menjadi masalah pelik jika tidak menyediakan kesempatan kerja yang luas. Dengan harapan memiliki SDM berkualitas unggul, daya saing negara bisa meningkat. Selain itu, efek *shock positif* seperti dampak revolusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa tercipta.

Baik secara nasional maupun Bali pada khususnya, capaian pembangunan manusia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya seluruh komponen pembangunan manusia. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditingkatkan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.

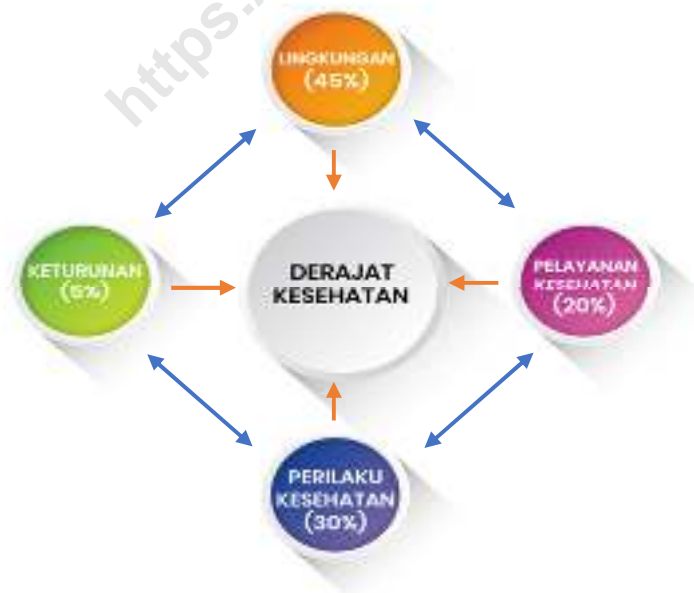
3.1 Hidup Lebih Lama dan Kesehatan yang Lebih Baik

Sebagai salah satu komponen pembentuk pembangunan manusia, kesehatan merupakan hak setiap orang. Fasilitas, pelayanan hingga program kesehatan juga telah diluncurkan pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Di sisi lainnya, secara mandiri dari faktor kesadaran, kemauan dan kemampuan kiranya setiap orang juga

mengusahakan meningkatkan derajat kesehatan dirinya. Dengan harapan kualitas kesehatan yang semakin meningkat, nampaknya harapan hidup lebih lama juga bisa diraih.

Berdasarkan Teori Henrik L. Blum (Notoadmodjo, 2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbidity). Angka mortalitas menunjukkan jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) dapat mengindikasikan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya. Pada tahun 2019 capaian UHH Bali sebesar 71,99 tahun, meningkat 0,31 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2010-2018, UHH Bali meningkat 1,38 tahun atau rata-rata mampu tumbuh sekitar 0,22 persen setiap tahunnya.

Gambar 3.1 Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)



Sumber : Kementerian Kesehatan RI

Selain itu, indikator lain yang mampu menjelaskan tingkat kesehatan adalah angka kesakitan atau morbiditas. Morbiditas adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi morbiditas berarti menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Tingkat kesehatan yang rendah akan meningkatkan tingkat mortalitas dan akhirnya berdampak dengan menurunkan umur harapan hidup. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, angka morbiditas Bali tercatat sebesar 15,96 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dari 14,69 persen di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Bali relatif menurun dalam setahun terakhir.

Berdasarkan teori Henrik L. Blum, tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk yang merupakan ukuran dari derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar yaitu 45 persen. Sementara itu, pengaruh perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan kependudukan/keturunan sebesar 5 persen. Keempat faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan manusia (Kasnodiharjo dkk, 1997).

a. Meningkatkan Kondisi Lingkungan yang Sehat

Sesuai dengan teori Blum, lingkungan menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan, yaitu sebesar 45 persen. Pengelolaan lingkungan yang baik sesungguhnya mampu meminimalisir bahkan mencegah timbulnya penyakit. Pentingnya menjaga kondisi lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman kiranya mampu meningkatkan kualitas kesehatan. Selain

diperlukan peran pemerintah dalam menjaga kondisi lingkungan secara umum, peran mandiri masyarakat juga memegang peranan penting dalam upaya ini.

Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar, kondisi sanitasi, sumber air minum layak, dan jenis lantai terluas. Berdasarkan data Susenas tahun 2019, menunjukkan bahwa 95,71 persen rumah tangga di Bali yang sudah memiliki/menggunakan fasilitas tempat buang air. Dengan kata lain masih ada 4,29 persen rumah tangga di Bali yang tidak memiliki/menggunakan fasilitas tempat buang air.

Gambar 3.2 Indikator Lingkungan Bali, 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik


Indikator lain adalah akses sanitasi layak yang merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan (dilengkapi dengan kloset leher angsa dan dengan tempat pembuangan tangki septik). Faktor sanitasi sangat

penting karena masyarakat membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sanitasi layak tidak terpenuhi, maka fasilitas tersebut akan rentan dalam menularkan dan menumbuhkan penyakit. Pada tahun 2019, penduduk Bali yang sudah menikmati sanitasi layak sebesar 94,59 persen. Artinya masih terdapat 5,41 persen penduduk Bali yang belum menggunakan fasilitas buang air dengan sanitasi layak.

Dari sisi sumber air minum, sebesar 96,84 persen rumah tangga di Bali pada tahun 2019 memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak. Artinya hanya masih sekitar 3,16 persen rumah tangga di Bali yang kondisi sumber air minumnya rentan terhadap infeksi penyakit. Meski tergolong sedikit yang belum memiliki akses ini, bantuan pemerintah seperti penyuluhan mengenai penggunaan air bersih oleh masyarakat, sekaligus juga pemberian fasilitas air bersih kiranya masih diperlukan.

Indikator lainnya yang juga cukup berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan adalah jenis lantai rumah masyarakat. Syarat yang paling penting adalah tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan, sehingga penularan penyakit dapat dihindari. Kriteria lantai yang baik adalah yang berasal dari ubin atau semen, bukan dari tanah karena tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria tersebut. Pada tahun 2019, hanya sekitar 1,17 persen rumah tangga di Bali yang jenis lantai terluasnya adalah tanah. Nampaknya hal ini terkait dengan kondisi rumah tangga tersebut yang masih dalam kategori miskin. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang harus dilakukan karena berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan melihat keempat indikator diatas, secara umum derajat kesehatan masyarakat di Bali sudah dalam kondisi baik. Seluruh capaian indikator menunjukkan nilai diatas 90 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Bali memiliki kondisi kesehatan lingkungan



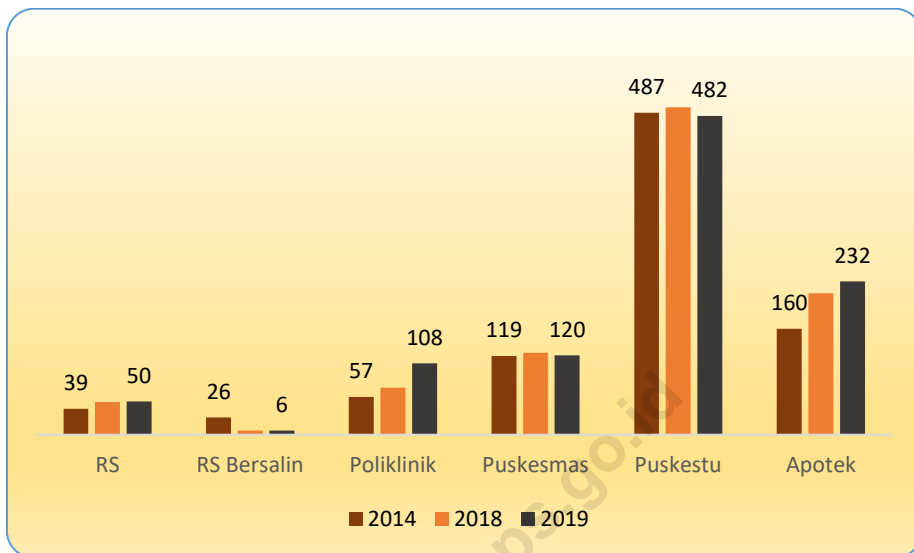
yang sudah bagus. Upaya memperbaiki lingkungan kiranya masih perlu dilakukan dalam mencapai kondisi yang ideal atau minimal mempertahankan kondisi yang ada saat ini. Dengan lingkungan sehat, penularan berbagai penyakit bisa dicegah sehingga akan mengurangi angka morbiditas yang pada akhirnya akan menambah angka harapan hidup.

b. Fasilitas Kesehatan Terus Meningkat

Mengingat pentingnya pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk, menjadikan fasilitas kesehatan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) jumlah fasilitas kesehatan selama periode 2014-2019 sebagian besar mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas kesehatan. Diantara fasilitas tersebut, puskesmas terbantu merupakan sarana kesehatan yang keberadaannya paling banyak di Bali. Dari sisi persentase peningkatan, sarana apotek meningkat paling tinggi selama lima tahun terakhir, tercatat sebesar 45,00 persen.

Gambar 3.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan di Bali, 2014-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

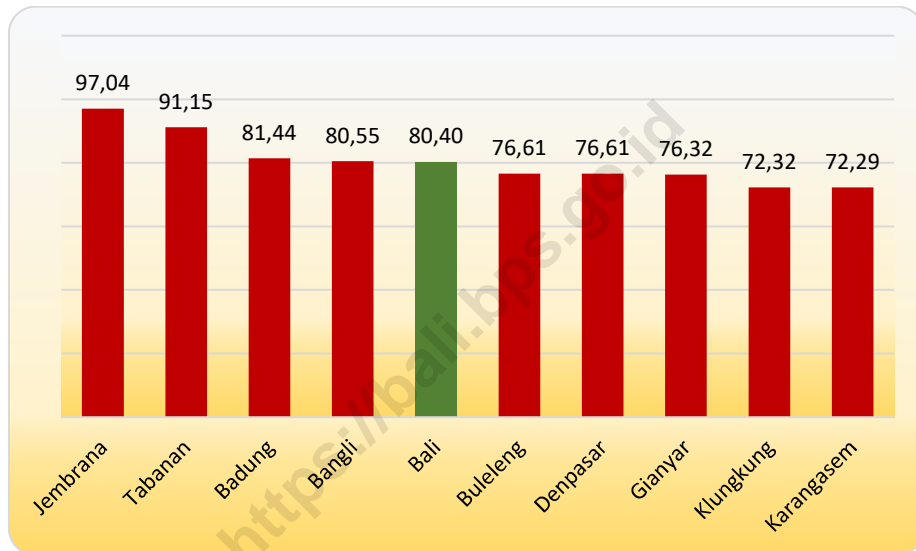
c. Kesadaran terhadap Perilaku Sehat Masih Kurang

Perilaku sehat sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Dalam teori Blum, perilaku sehat menyumbang 30 persen dalam mengukur derajat kesehatan manusia. Salah satu contoh perilaku sehat adalah tidak merokok. Di Bali, menghindari merokok oleh sebagian penduduknya sepertinya sangat sulit dilakukan, khususnya penduduk laki-laki.

Bahaya rokok bagi kesehatan sangat besar karena mengandung nikotin. Menurut Sue Armstrong (1991), nikotin merupakan bahan kimia yang tidak berwarna dan merupakan salah satu racun paling keras. Dalam jumlah besar, nikotin sangat berbahaya, yaitu antara 20 mg sampai 50 mg nikotin dapat menyebabkan terhentinya pernapasan. Selain nikotin, rokok juga mengandung karbon monoksida dan tar yang berbahaya bagi kesehatan

(Mandagi, 1996) Tidak hanya kandungan zatnya, asap rokok juga berbahaya karena mengandung polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu seseorang yang merokok tidak hanya membahayakan dirinya namun juga orang-orang sekitarnya yang umum disebut perokok pasif.

Gambar 3.4 Rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap perminggu di Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2019 (batang)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Rata-rata konsumsi rokok di Bali sekitar 80 batang perminggu. Konsumsi tertinggi di Kabupaten Jembrana yang mencapai 97 batang. Dampak buruk rokok tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga kemiskinan. Bahkan rokok termasuk dalam satu urutan komoditas yang memberikan sumbangan cukup tinggi terhadap garis kemiskinan.

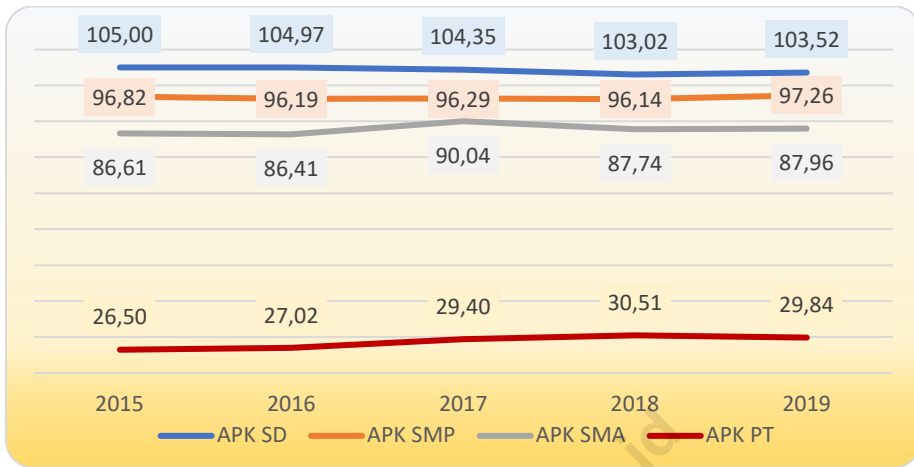
3.2 Pendidikan Memperluas Peluang

Pentingnya peran pendidikan kiranya mampu memperluas peluang keberhasilan kehidupan, misalnya di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi. Sebegitu dibutuhkannya peran pendidikan membuat pendidikan selalu menjadi salah satu prioritas utama baik di RPJMN maupun RPJMD.

Beberapa indikator yang mampu menunjukkan peran pendidikan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menggambarkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sementara itu, APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

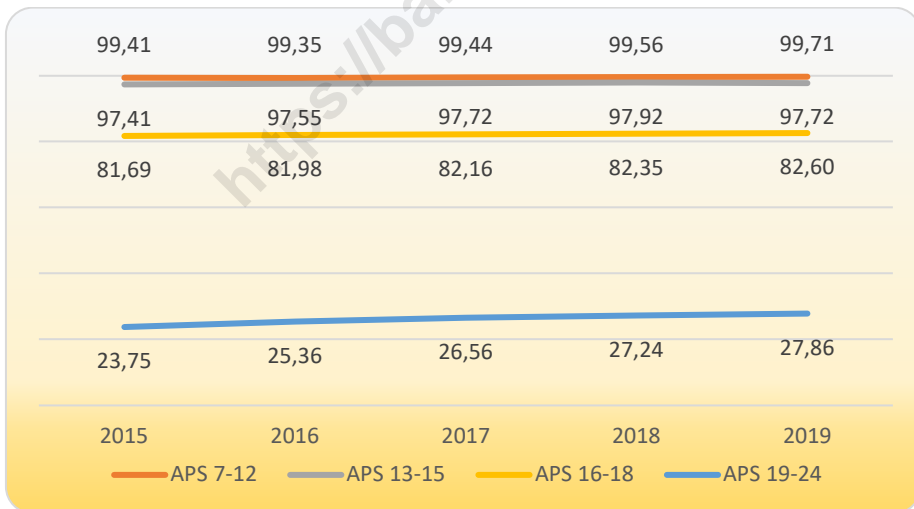
Secara umum, APK Bali mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019. Peningkatan tertinggi tercatat pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) yang meningkat 3,34 poin selama lima tahun terakhir. Hanya jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang mengalami penurunan, yaitu sedalam -1,48 poin. Pada tahun 2019, APK SD mencapai besaran 103,52 persen. Besaran APK yang lebih dari 100 persen diduga karena ada anak dibawah umur 7 tahun yang sudah masuk SD. Sementara itu, APK PT tercatat sebagai yang terendah, yaitu mencapai 29,84 persen.

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Bali, 2015-2019 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

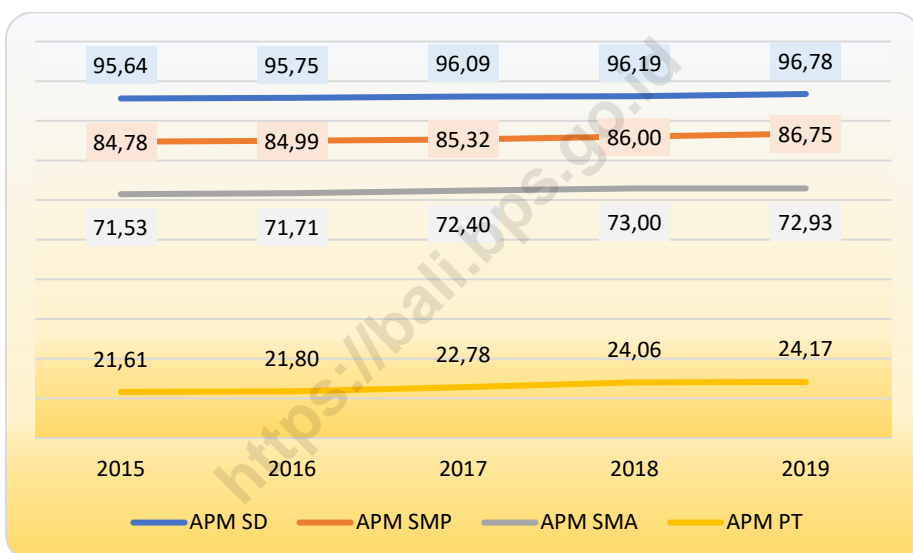
Gambar 3.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Bali, 2015-2019 (persen)



Indikator pendidikan lainnya yakni Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator ini lebih relevan dibandingkan dengan APK ketika mencari informasi

gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Baik secara umum dan seluruh jenjang pendidikannya, APM Bali selama periode 2015 sampai 2019 tercatat meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan perguruan tinggi yang meningkat 2,56 poin sedangkan peningkatan terendah terjadi pada jenjang pendidikan sekolah dasar yang hanya meningkat 1,14 poin.

Gambar 3.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Bali, 2015-2019 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

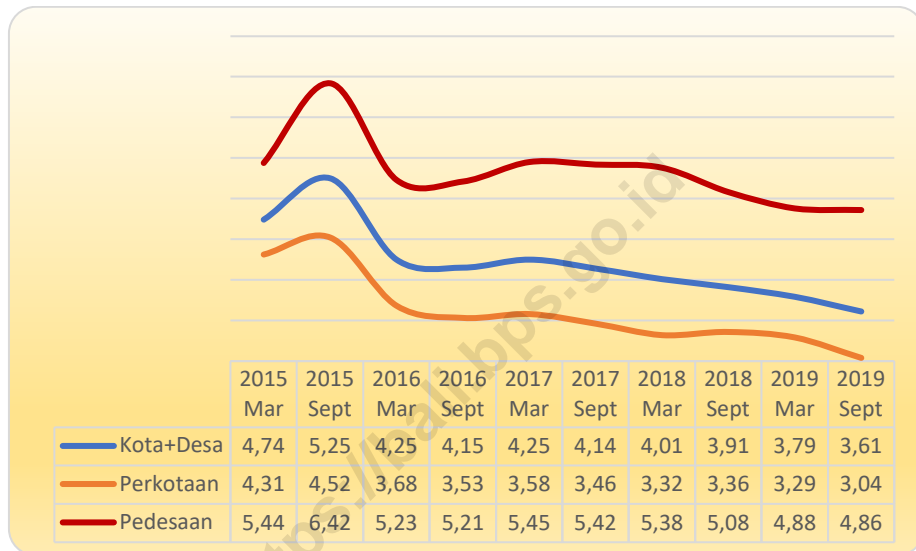
3.3 Peningkatan Standar Hidup Layak

a. Pentingnya Pengurangan Angka Kemiskinan

Kapabilitas seseorang dalam ekonomi seringkali terbentur dengan kemiskinan. Uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan. Faktor kemiskinan dapat menghambat berbagai aspek dalam kehidupan diantaranya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan kapabilitas dasar dalam

pembangunan manusia. Menanggulangi kemiskinan bukan perkara yang mudah karena terkait dengan berbagai dimensi kehidupan yang saling berpengaruh satu sama lain.

Gambar 3.8 Tren Kemiskinan di Bali Menurut Perkotaan dan Perdesaan, 2015-2019 (persen)

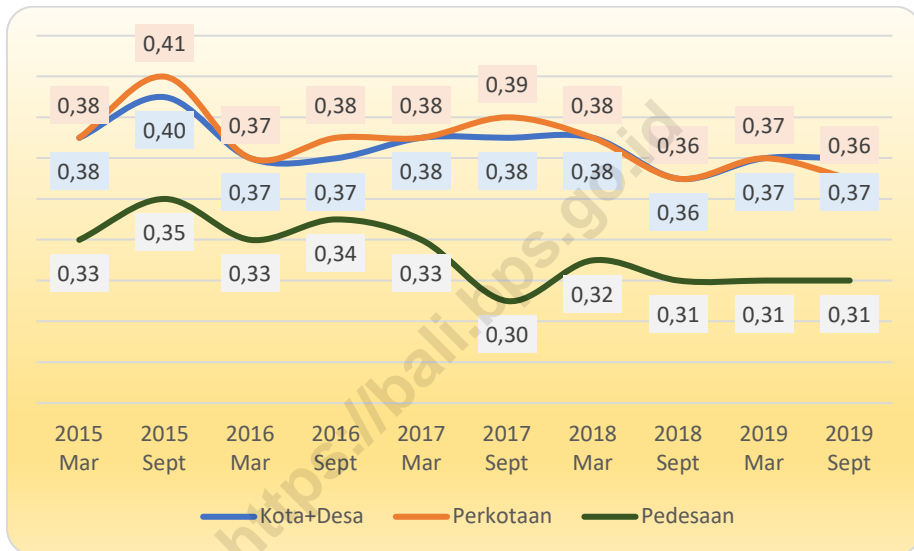


Sumber : Badan Pusat Statistik

Semenjak periode 2015 hingga 2019, persentase kemiskinan Bali cenderung menurun. Pada September 2015, persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tercatat sebesar 5,25 persen. Besaran tersebut turun 1,64 poin menjadi 3,61 persen pada tahun 2019. Jika melihat perbandingan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, persentase kemiskinan pedesaan selalu lebih tinggi selama lima tahun terakhir ini. Pada September tahun 2019 tercatat sebanyak 4,86 persen penduduk miskin di pedesaan dan 3,04 persen penduduk miskin di perkotaan.

Penurunan kemiskinan didukung juga oleh menurunnya ketimpangan pengeluaran penduduk yang dicerminkan oleh *gini ratio*. *Gini ratio* Bali selama periode tahun 2015-2019 berada di angka 0,3 sampai 0,4 dan pada September 2019, gini rasio mencapai titik sebesar 0,36.

Gambar 3.9 Tren Gini Rasio Menurut Perkotaan dan Perdesaan di Bali, 2015-2019



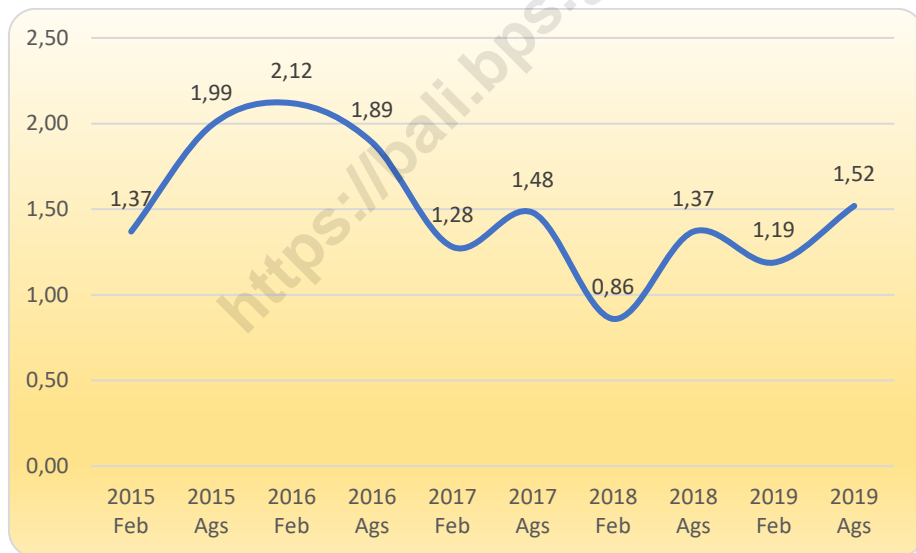
Sumber : Badan Pusat Statistik

Selain berfokus pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan, hal yang tak kalah penting adalah pemerataan secara spasial baik antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan namun dari sisi ketimpangan, perkotaan tercatat lebih tinggi. Selama periode 2015-2019, jarak *gini ratio* perkotaan dan perdesaan terlebar terjadi pada tahun 2017. Pada September tahun 2017, selisih *gini ratio* kedua wilayah tersebut berjarak sebesar 0,09 poin.

b. Pentingnya Penurunan Pengangguran

Selain masalah kemiskinan, masalah yang dirasa masih menjadi salah satu prioritas utama adalah masalah pengangguran. Tren perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Bali dalam periode 2015 sampai 2019 cenderung stagnan. Rendahnya TPT Bali bahkan terendah secara nasional membuat peluangnya untuk menurun menjadi sulit. Selama periode tersebut, TPT tertinggi terjadi pada Februari Tahun 2016. Ketika itu besaran TPT tercatat sebesar 2,12 persen. Sedangkan TPT terendah terjadi pada Februari 2018 yang capaiannya bahkan di bawah satu persen (0,86 %).

Gambar 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali, 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

BAB 4

Disparitas Pembangunan Manusia



JPM Kota Denpasar
83,68

16,34 poin

JPM Kab. Karangasem
67,34

Bab 4

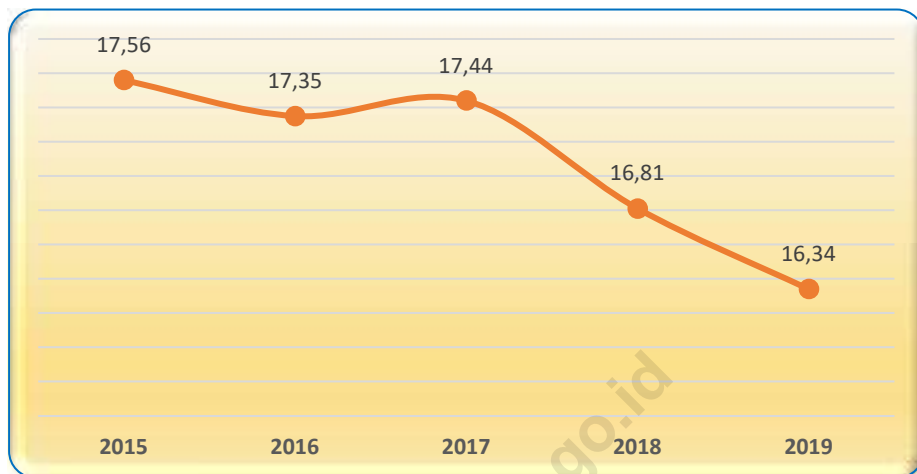
DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1 Disparitas Pembangunan Manusia di Provinsi Bali

Gambaran umum kesenjangan pembangunan manusia tingkat provinsi kiranya ditunjukkan dari disparitas pembangunan manusia antar kabupaten/kota. Perbedaan latar belakang geografi, sosial, ekonomi yang berbeda-beda membuat capaian IPM di setiap wilayah menjadi bervariasi. Perubahan selisih antara wilayah yang memiliki capaian tertinggi dengan terendah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia tertinggi tercatat pada Kota Denpasar sedangkan terendah pada Kabupaten Karangasem. Selisih IPM kedua wilayah tersebut menunjukkan disparitas IPM Provinsi Bali.

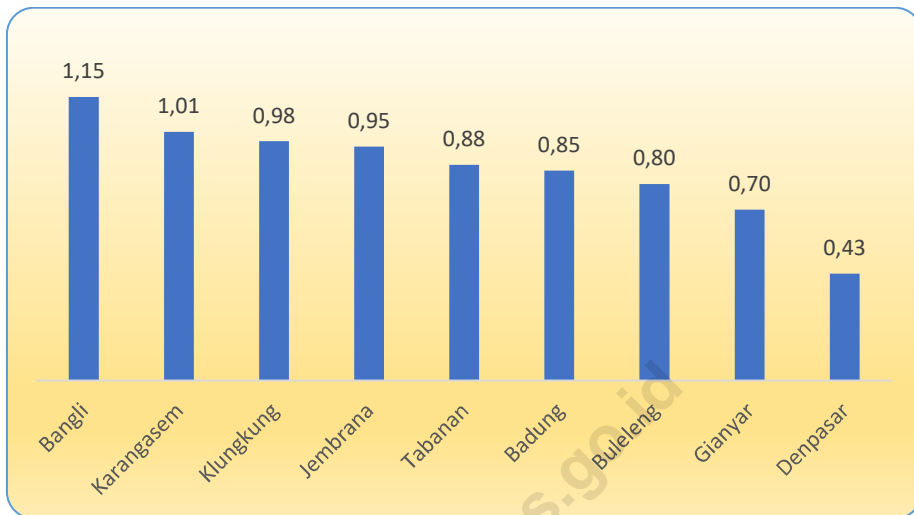
Selama lima tahun terakhir (2015 s.d. 2019), secara umum disparitas pembangunan manusia Bali cenderung menurun. Nilai disparitas IPM tertinggi tercatat pada tahun 2015 yang ketika itu mencapai 17,56 poin. Setahun kemudian menurun hingga sebesar 17,35 poin pada tahun 2016. Meski sempat meningkat pada tahun 2017, disparitas pembangunan manusia Bali kembali menurun pada tahun selanjutnya hingga menjadi sebesar 16,81 poin pada tahun 2018 dan 16,34 poin pada tahun 2019.

Gambar 4.1. Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2015-2019



Pada umumnya daerah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah berpeluang meningkat lebih cepat dibandingkan daerah dengan capaian manusia yang sudah tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan IPM selama lima tahun terakhir Kabupaten Karangsem lebih tinggi dibandingkan Kota Denpasar. Rata-rata pertumbuhan pertahun Kabupaten Karangsem tercatat sebesar 1,01 persen sedangkan Kota Denpasar sebesar 0,43 persen. Menariknya, ternyata Kabupaten Bangli memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi. Tahun 2019, tercatat tumbuh 1,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 4.2. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Bali, 2015-2019



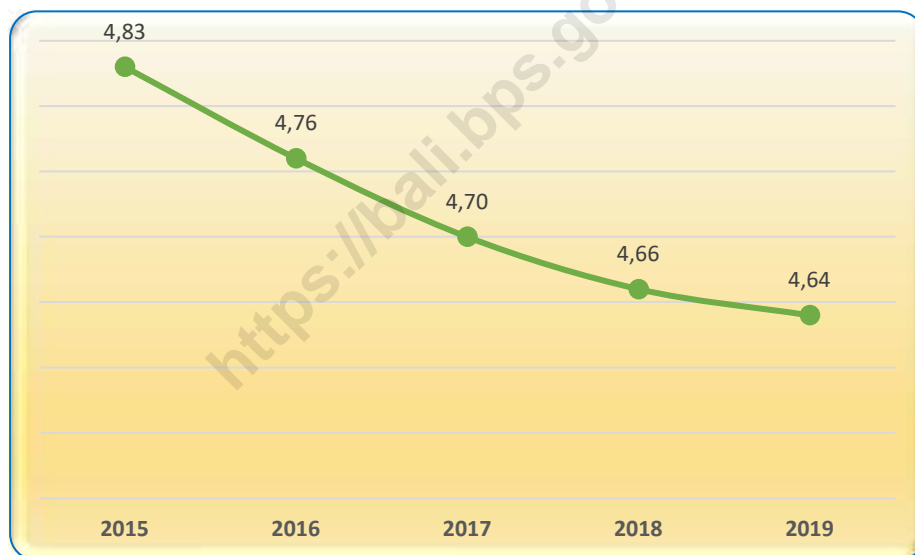
Penurunan kesenjangan IPM selama lima tahun terakhir ini kiranya menjadi kabar yang menggembirakan. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan manusia di Provinsi Bali nampaknya sudah berada dalam jalur yang benar. Kesenjangan pembangunan manusia antara Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem semakin mengecil. Namun upaya pemerataan ini masih perlu ditingkatkan. Di satu sisi, kelengkapan dan kemudahan sarana prasarana sebagai daerah perkotaan tentunya membuat Kota Denpasar lebih mudah dalam memacu peningkatan kualitas manusianya. Sementara itu dari dominan pedesaan, Kabupaten Karangasem nampaknya masih memerlukan sentuhan pemerintah baik dari sisi dana maupun fasilitas dalam meningkatkan upaya pembangunan manusia.

a. Selisih Umur Harapan Hidup

Kesehatan merupakan impian berbagai orang. Dalam kondisi yang terhindar dari berbagai penyakit, kegiatan sehari-hari bisa lancar dilakukan tanpa ada gangguan yang berarti. Secara umum keadaan kesehatan

masyarakat Bali saat ini semakin membaik. Hal tersebut didukung pula dengan disparitas kesehatan antar kabupaten/kota yang semakin mengecil. Kondisi ini dapat dilihat dari semakin dekatnya jarak antara Umur Harapan Hidup (UHH) tertinggi dengan terendah selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 selisih UHH sebesar 4,83 tahun, disparitas tersebut terus mengalami penurunan per tahunnya hingga menjadi sebesar 4,64 tahun di tahun 2019.

Gambar 4.3. Selisih UHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2015-2019

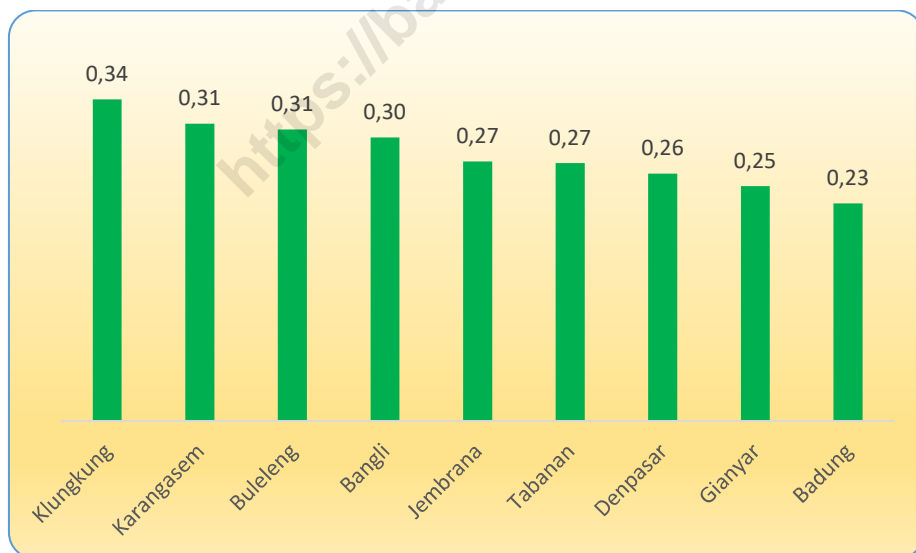


Capaian UHH tertinggi tahun 2019 tercatat pada Kabupaten Badung yang tercatat sebesar 74,99 tahun. Besaran tersebut menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2019 di Kabupaten Badung diperkirakan mencapai umur 75 tahun. Sedangkan UHH terendah tercatat di Kabupaten Karangasem. Kabupaten tersebut memiliki besaran UHH yakni sebesar 70,35 tahun. Bayi yang lahir di Karangasem diperkirakan mencapai umur 70 tahun. Selisih

capaian UHH tertinggi dan terendah menunjukkan terdapat disparitas UHH tahun 2019 Provinsi Bali yang sebesar 4,64 tahun.

Disparitas UHH yang terus mengalami penurunan ini kiranya menggambarkan pemerintah cukup berhasil dalam melakukan pemerataan pembangunan manusia dari segi kesehatan. Dari rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya, Kabupaten Klungkung mampu tumbuh paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yakni sebesar 0,34 persen. Selalu menjadi peringkat terakhir semenjak tahun 2014, Kabupaten Karangasem mampu menyusul UHH Kabupaten Bangli di tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,31 persen. Sementara itu Kabupaten Badung tercatat rata-rata tumbuh 0,23 persen per tahunnya.

Gambar 4.4. Rata-rata pertumbuhan UHH Kabupaten/Kota di Bali, 2015-2019



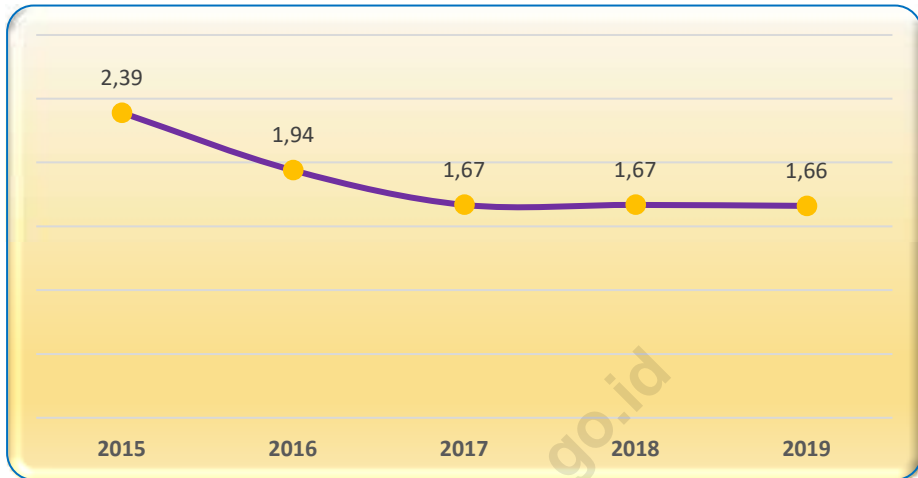
b. Selisih Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah

Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas kiranya peningkatan melalui mutu pendidikan perlu dilakukan. Tidak hanya mutu, pemerataan pembangunan manusia dari sisi pendidikan juga perlu diupayakan. Apalagi pada periode pemerintahan kali ini presiden melalui pidato kemerdekaan menekankan pada program untuk mencapai kualitas SDM yang unggul. Dengan kualitas SDM tersebut diharapkan Indonesia bisa maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

Kesenjangan pembangunan manusia dari sisi pendidikan menjadi salah satu tantangan saat ini. Kesenjangan tersebut dapat dilihat melalui disparitas dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan.

Disparitas angka harapan lama sekolah ditunjukkan dari rentang perbedaan capaian tertinggi dan terendah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selama lima tahun terakhir nilai disparitas HLS cenderung menurun. Pada tahun 2015 disparitas HLS tercatat sebesar 2,39 tahun. Kemudian mengalami tren yang menurun pada tahun-tahun setelahnya, hingga pada tahun 2019 disparitas antara HLS tertinggi dan terendah di Provinsi Bali tercatat 1,66 tahun.

Gambar 4.5. Selisih HLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2015-2019

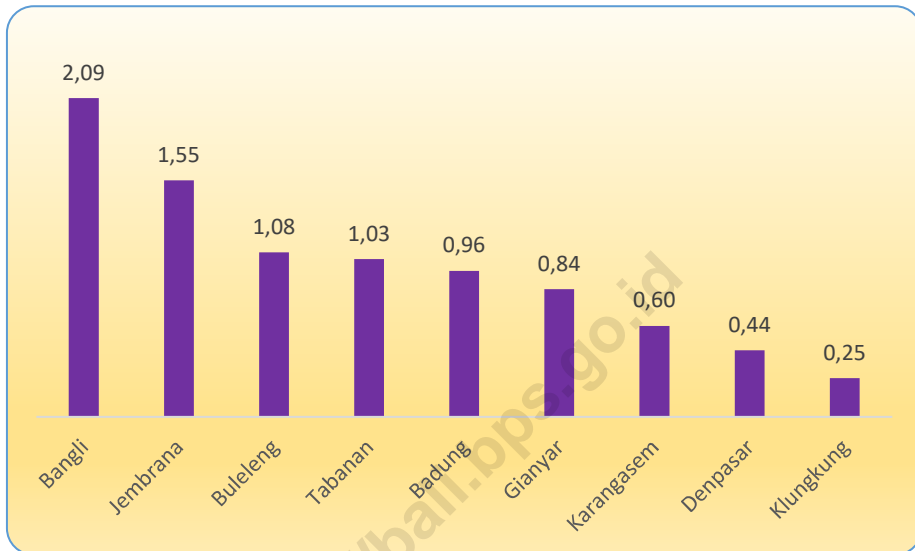


Disparitas angka harapan lama sekolah di Bali dilihat dari perbedaan capaian antara Kota Denpasar sebagai yang tertinggi dan Kabupaten Bangli sebagai yang terendah. Pada tahun 2019, rata-rata penduduk usia 7 tahun di Kota Denpasar berpotensi menempuh pendidikan selama 13,99 tahun atau menyelesaikan D1. Di tahun yang sama, penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Bangli hanya berpotensi menempuh pendidikan selama 12,33 tahun atau sekitar tamat SLTA sederajat.

Kesenjangan yang cenderung menurun ini juga didukung dari rata-rata pertumbuhan HLS Kabupaten Bangli yang lebih tinggi dibandingkan Kota Denpasar. Semenjak tahun 2015 sampai 2019, HLS Bangli rata-rata tumbuh sebesar 2,09 persen setiap tahunnya. Sedangkan Kota Denpasar rata-rata tumbuh 0,44 persen setiap tahunnya. Sisi lainnya, ternyata rata-rata pertumbuhan HLS Kabupaten Klungkung lebih rendah dibandingkan Kota Denpasar bahkan tercatat sebagai yang terendah di Bali. Jika kondisi ini tetap berlanjut, maka nilai harapan lama sekolah Klungkung kedepannya bisa

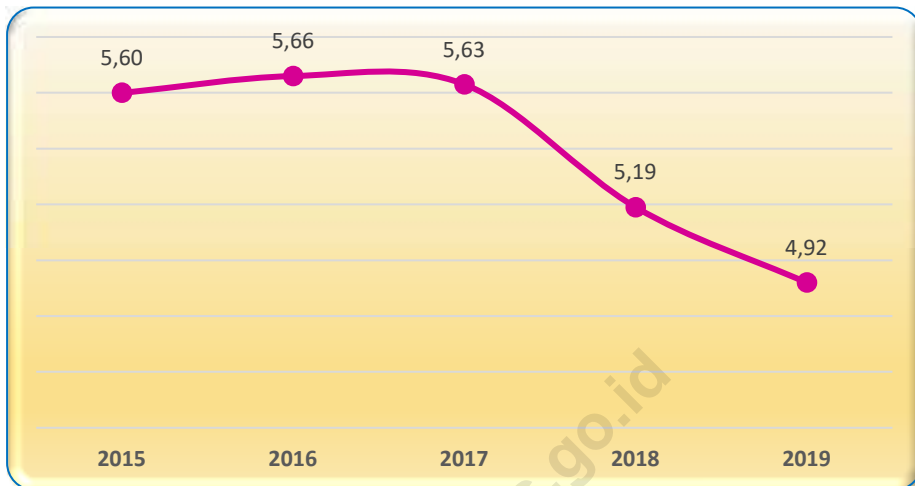
disusul kabupaten lainnya dan kesenjangan dengan wilayah capaian tertinggi semakin melebar.

Gambar 4.6. Rata-rata pertumbuhan HLS Kabupaten/Kota di Bali 2015-2019



Sementara itu disparitas rata-rata lama sekolah provinsi Bali ditunjukkan dari selisih rata-rata lama sekolah Kota Denpasar dengan rata-rata lama sekolah Kabupaten Karangasem. RLS Kota Denpasar menunjukkan capaian tertinggi sedangkan RLS Kabupaten Karangasem sebagai yang terendah. Secara umum disparitas RLS Bali cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Meski sempat meningkat 0,06 poin dari tahun 2016, disparitas atau kesenjangan pada indikator ini menurun pada tiga tahun setelahnya. Penurunan terdalam terjadi di tahun 2017 ke tahun 2018 yang turun sedalam 0,42 poin.

Gambar 4.7. Selisih RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali, 2015-2019

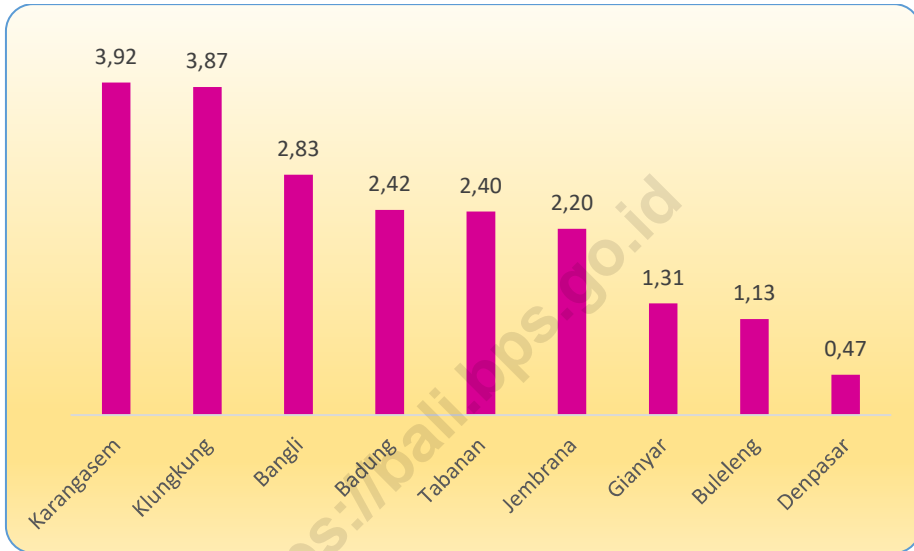


Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah Kota Denpasar tercatat sebesar 11,23 tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kota Denpasar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan kelas dua SLTA. Sementara itu rata-rata lama sekolah Kabupaten Karangasem tercatat sebesar 6,31 tahun, yang menunjukkan rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menamatkan Sekolah Dasar. Sebagai capaian tertinggi dan terendah, perbedaan keduanya menunjukkan Disparitas RLS Bali tahun 2019 yang mencapai selisih 4,92 tahun.

Dari sisi rata-rata pertumbuhan per tahun, sebagai wilayah dengan capaian tertinggi, RLS Kota Denpasar rata-rata tumbuh sebesar 0,47 persen per tahun. Sedangkan RLS Kabupaten Karangasem rata-rata tumbuh sebesar 3,92 persen per tahun. Perbedaan pertumbuhan yang lebih cepat pada Kabupaten Karangasem dibandingkan Kota Denpasar menunjukkan kemungkinan disparitas RLS mengecil di beberapa tahun kedepan. Angka disparitas yang semakin pendek ini kiranya menggambarkan pemerataan

sarana dan akses pendidikan oleh pemerintah sudah berjalan tepat. Hal ini harus tetap dipertahankan agar kesenjangan pada dimensi pendidikan semakin mengecil.

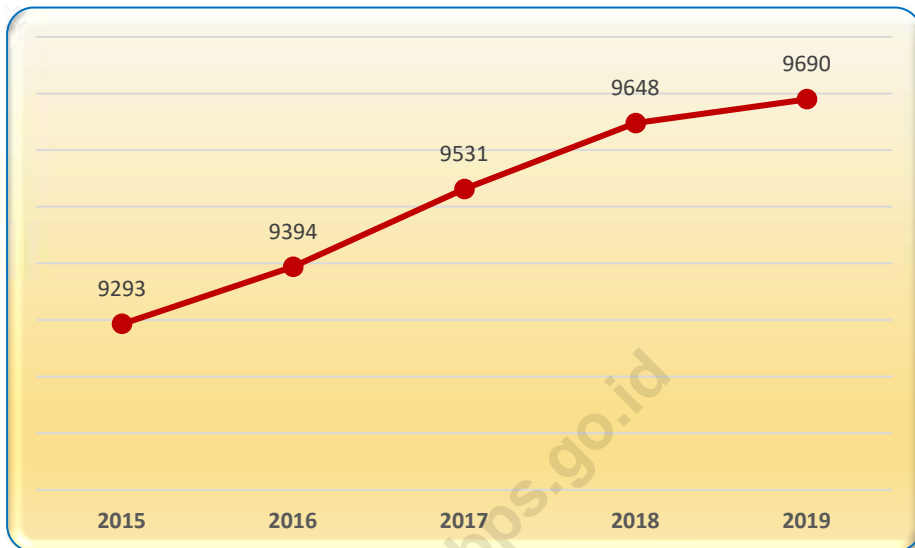
Gambar 4.8. Rata-rata Pertumbuhan RLS Kabupaten/Kota di Bali, 2015-2019



c. Selisih Pengeluaran per Kapita

Dimensi terakhir yakni dimensi standar hidup layak yang menjadi salah satu dimensi yang penting dalam menunjukkan kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita. Selama kurun waktu 2015 hingga 2019, indikator ini terus menunjukkan peningkatan. Namun hal tersebut masih menyisakan persoalan kesenjangan antarwilayah.

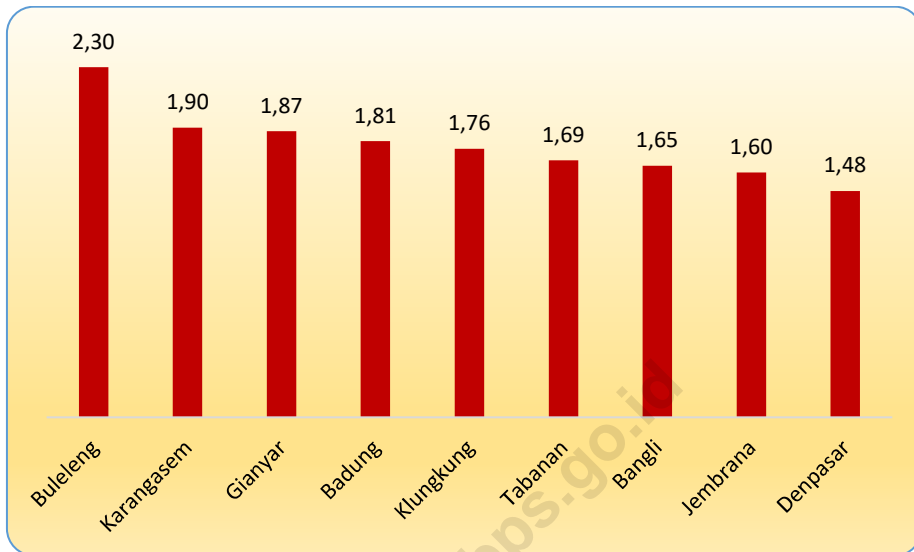
Gambar 4.9. Selisih PPP Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Bali,
2015-2019



Disparitas pengeluaran per kapita cenderung meningkat. Capaian pengeluaran per kapita kabupaten/kota tertinggi tercatat pada Kota Denpasar sedangkan terendah pada Kabupaten Karangasem. Selisih kedua capaian tersebut pada tahun 2015 bernilai sebesar 9,3 juta rupiah. Selisih tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 9,69 juta rupiah pada tahun 2019.

Jika melihat rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir, pertumbuhan pengeluaran per kapita Kota Denpasar rata-rata tumbuh sebesar 1,48 persen setiap tahunnya. Besaran tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Karangasem yang sebesar 1,90 persen. Jika kondisi ini bisa dipertahankan, grafik disparitas pengeluaran perkapita Bali nantinya akan semakin melandai yang artinya kesenjangan semakin mengecil.

Gambar 4.10. Rata-rata Pertumbuhan PPP Kabupaten/Kota di Bali 2015-2019



4.2 Komponen Pembangunan Manusia Tertinggi dan Terendah

Secara umum, capaian tiga tertinggi maupun terendah di Bali cenderung seragam. Peringkat tertinggi IPM dicapai oleh Kota Denpasar, sedangkan peringkat kedua dan ketiga dicapai Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Komposisi tersebut juga hampir terjadi pada seluruh komponen pembentuk. Hanya pada komponen umur harapan hidup capaian Kota Denpasar tercatat lebih rendah dibandingkan Kabupaten Badung. Dominasi Kota Denpasar dalam pembangunan manusia di Bali nampaknya tidak terlepas dari kemudahan akses dan fasilitas yang ada di dalamnya. Selain itu, sebagai pusat ekonomi Bali, pengeluaran per kapita di Kota Denpasar tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Sementara itu, capaian IPM terendah dicatatkan oleh Kabupaten Karangasem. Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung mencatatkan

capaian terendah selanjutnya. Ketiga kabupaten tersebut hampir selalu ada dalam tiga terendah komponen pembentuk IPM. Hanya pada komponen harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah terdapat kabupaten lainnya sebagai tiga terendah. Pada komponen harapan lama sekolah, Kabupaten Jembrana tercatat sebagai ketiga terendah sedangkan rata-rata lama sekolah, Kabupaten Buleleng tercatat sebagai kedua terendah. Secara umum, Kabupaten Karangasem tercatat sebagai kabupaten yang hampir semuanya mencatatkan capaian terendah. Hanya pada komponen harapan lama sekolah Kabupaten Bangli tercatat lebih rendah dibandingkan Kabupaten Karangasem.

Tabel 4.1 Delapan Kabupaten/Kota dengan Komponen Pembangunan Manusia Tertinggi dan Terendah, 2019

Tertinggi				
Umur Harapan Hidup (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran Per Kapita	IPM
Badung	Kota Denpasar	Kota Denpasar	Kota Denpasar	Kota Denpasar
Kota Denpasar	Badung	Badung	Badung	Badung
Gianyar	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Gianyar
Terendah				
Umur Harapan Hidup (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran Per Kapita	IPM
Karangasem	Bangli	Karangasem	Karangasem	Karangasem
Bangli	Karangasem	Buleleng	Bangli	Bangli
Klungkung	Jembrana	Bangli	Klungkung	Klungkung

4.3 Disparitas Pembangunan Manusia di Wilayah Sarbagita dan Non-Sarbagita

Sarbagita merupakan akronim dari Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Berdasarkan Perpres nomor 45 tahun 2011 selanjutnya yang diubah dengan Perpres nomor 51 tahun 2014, Sarbagita digadang-gadang sebagai wilayah metropolitan Bali. Dominan wilayah perkotaan, secara umum capaian pembangunan manusia di Sarbagita memang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Non-Sarbagita. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkotaan memiliki kelebihan dan daya tarik tersendiri. Ketersediaan dan kemudahan fasilitas yang memadai membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan aktivitas. Selain itu kiranya pusat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya berpusat pada wilayah ini. Dari sisi ekonomi, wilayah Sarbagita memberikan kontribusi hampir 70 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto Bali.

Pada tahun 2019, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah Sarbagita adalah Kota Denpasar dengan IPM mencapai 83,68. Sementara itu, Kabupaten Jembrana mencatatkan sebagai kabupaten dengan capaian pembangunan manusia tertinggi untuk wilayah Non-Sarbagita pada tahun 2019. IPM Jembrana tercatat mencapai 72,35. Periode waktu yang sama, capaian pembangunan manusia untuk wilayah Sarbagita yang paling rendah adalah Kabupaten Tabanan. Kabupaten ini mencatatkan nilai IPM sebesar 76,16. Sedangkan untuk wilayah Non-Sarbagita, capaian pembangunan manusia terendah tercatat di Kabupaten Karangsem dengan IPM sebesar 67,34.

Perbedaan disparitas atau kesenjangan pembangunan manusia antara Sarbagita dengan Non Sarbagita tidak terlalu signifikan. Selisih IPM antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Tabanan berjarak 7,52 poin. Jika dibandingkan dengan kondisi wilayah Non-Sarbagita, selisih IPM Kabupaten

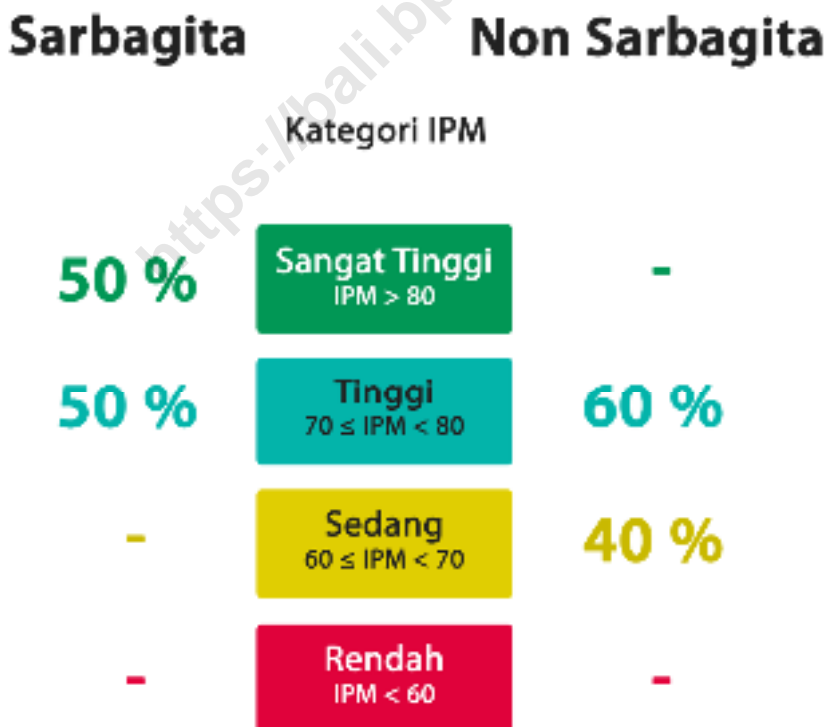
Jembrana dengan Kabupaten Karangasem berjarak 5,01 poin. Kondisi tersebut mencerminkan disparitas pembangunan manusia yang terjadi di Non-Sarbagita hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di wilayah Sarbagita. Hal ini diduga karena dominasi Kota Denpasar sebagai ibukota provinsi yang terlalu kuat dan atau jarak antar kabupaten di wilayah Non-Sarbagita yang tidak terlalu jauh dengan pusat perekonomian Bali.

Gambar 4.11. Perbandingan IPM Wilayah Sarbagita dengan Non Sarbagita di Provinsi Bali, 2019



Berdasarkan status pembangunan manusia, Sarbagita tercatat lebih maju dibandingkan Non-Sarbagita. Tahun 2019, sebagian wilayah Sarbagita tercatat sebagai status pembangunan manusia “sangat tinggi”. Sementara di wilayah Non-Sarbagita belum ada wilayah dengan capaian status tersebut. Sebagian wilayah Sarbagita lainnya tercatat sebagai status pembangunan manusia “tinggi”. Dari lima kabupaten dari wilayah Non-Sarbagita, tiga kabupaten (60 persen) berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”. Sedangkan wilayah lainnya masih berstatus pembangunan “sedang”.

Gambar 4.12. Perbandingan IPM Wilayah Sarbagita dengan Non Sarbagita di Provinsi Bali Menurut Status, 2019

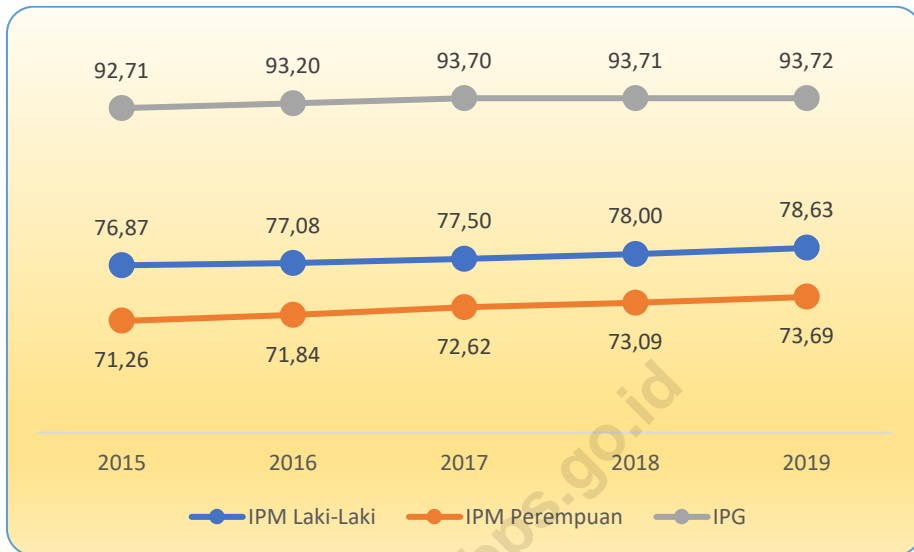


4.4 Disparitas Pembangunan Manusia Berdasarkan Gender

Kesetaraan gender nampaknya sudah menjadi isu yang sudah sejak lama diperbincangkan. Pemaknaan kesetaraan gender terkait dengan ketimpangan antara keadaan dan kedudukan sosial ekonomi laki-laki dengan perempuan. Keterbatasan kesempatan memperoleh hak yang sama membuat kesenjangan antar kedua jenis kelamin kiranya semakin melebar. Isu kesetaraan gender sudah menjadi salah satu tujuan agenda pembangunan global yang bertajuk *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada goal kelima, United Nations (UN) berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia.

Disparitas atau kesenjangan pembangunan manusia menurut gender bisa dilihat dari indikator indeks pembangunan gender (IPG). Nilai IPG yang semakin mendekati 100 mencerminkan semakin kecilnya ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Jika nilainya lebih dari 100, maka capaian pembangunan perempuan lebih tinggi dibandingkan capaian laki-laki, begitu juga sebaliknya. Pada tahun 2019, indeks pembangunan gender Bali tercatat sebesar 93,72. Artinya, capaian pembangunan manusia laki-laki tercatat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Indeks pembangunan manusia laki-laki pada tahun ini tercatat sebesar 78,63 sedangkan perempuan tercatat mencapai 73,69.

Gambar 4.13. Perkembangan Indeks Perbangunan Gender Provinsi Bali, 2015-2019



Berdasarkan komponen pembentuk IPM, hampir pada seluruh komponen jenis kelamin laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Pada dimensi pendidikan, angka harapan lama sekolah laki-laki tercatat 13,38 tahun, lebih tinggi 0,16 tahun dibandingkan angka harapan lama sekolah perempuan. Begitu juga pada indikator rata-rata lama sekolah, RLS laki-laki tercatat sebesar 9,66 tahun sedangkan RLS perempuan mencapai 8,03 tahun. Dari sisi ekonomi, rata-rata pendapatan per kapita laki-laki di Bali yang diproksi dengan rata-rata pengeluaran per kapita sekitar 17,14 juta rupiah selama setahun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran per kapita perempuan yang mencapai 13,69 juta rupiah selama setahun. Hanya pada dimensi kesehatan capaian laki-laki tercatat lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Umur harapan hidup laki-laki tahun 2019 tercatat 70,11 tahun sedangkan umur harapan hidup perempuan mencapai 73,89 tahun. Salah satu faktor yang bisa menjadi penyebab adalah dari segi genetika. Secara kromosom, laki-laki memiliki kromosom XY

sementara perempuan XX. Artinya laki-laki cenderung lebih rentan penyakit dibandingkan dengan perempuan.

<https://bali.bps.go.id>

LAMPIRAN



Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Usia Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/org/tahun)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	69,87	14,30	9,18	9.603	71,90
Sumatera Utara	68,95	13,15	9,45	10.649	71,74
Sumatera Barat	69,31	14,01	8,92	10.925	72,39
Riau	71,48	13,14	9,03	11.255	73,00
Jambi	71,06	12,93	8,45	10.592	71,26
Sumatera Selatan	69,65	12,39	8,18	10.937	70,02
Bengkulu	69,21	13,59	8,73	10.409	71,21
Lampung	70,51	12,63	7,92	10.114	69,57
Kep. Bangka Belitung	70,50	11,94	7,98	12.959	71,30
Kepulauan Riau	69,80	12,83	9,99	14.466	75,48
DKI Jakarta	72,79	12,97	11,06	18.527	80,76
Jawa Barat	72,85	12,48	8,37	11.152	72,03
Jawa Tengah	74,23	12,68	7,53	11.102	71,73
D I Yogyakarta	74,92	15,58	9,38	14.394	79,99
Jawa Timur	71,18	13,16	7,59	11.739	71,50
Banten	69,84	12,88	8,74	12.267	72,44
Bali	71,99	13,27	8,84	14.146	75,38
Nusa Tenggara Barat	66,28	13,48	7,27	10.640	68,14
Nusa Tenggara Timur	66,85	13,15	7,55	7.769	65,23
Kalimantan Barat	70,56	12,58	7,31	9.055	67,65
Kalimantan Tengah	69,69	12,57	8,51	11.236	70,91
Kalimantan Selatan	68,49	12,52	8,20	12.253	70,72
Kalimantan Timur	74,22	13,69	9,70	12.359	76,61
Kalimantan Utara	72,54	12,84	8,94	9.343	71,15
Sulawesi Utara	71,58	12,73	9,43	11.115	72,99
Sulawesi Tengah	68,23	13,14	8,75	9.604	69,50
Sulawesi Selatan	70,43	13,36	8,26	11.118	71,66
Sulawesi Tenggara	70,97	13,55	8,91	9.436	71,20
Gorontalo	67,93	13,06	7,69	10.075	68,49
Sulawesi Barat	64,82	12,62	7,73	9.235	65,73
Maluku	65,82	13,94	9,81	8.887	69,45
Maluku Utara	68,18	13,63	9,00	8.308	68,70
Papua Barat	65,90	12,72	7,44	8.125	64,70
Papua	65,65	11,05	6,65	7.336	60,84
INDONESIA	71,34	12,95	8,34	11.299	71,92

Lampiran 2. Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2015-2019

Provinsi	IPM				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	69,45	70,00	70,60	71,19	71,90
Sumatera Utara	69,51	70,00	70,57	71,18	71,74
Sumatera Barat	69,98	70,73	71,24	71,73	72,39
Riau	70,84	71,20	71,79	72,44	73,00
Jambi	68,89	69,62	69,99	70,65	71,26
Sumatera Selatan	67,46	68,24	68,86	69,39	70,02
Bengkulu	68,59	69,33	69,95	70,64	71,21
Lampung	66,95	67,65	68,25	69,02	69,57
Kep. Bangka Belitung	69,05	69,55	69,99	70,67	71,30
Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48
DKI Jakarta	78,99	79,57	80,06	80,47	80,76
Jawa Barat	69,50	70,05	70,69	71,30	72,03
Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73
D I Yogyakarta	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99
Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77	71,50
Banten	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44
Bali	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38
Nusa Tenggara Barat	65,19	65,81	66,58	67,30	68,14
Nusa Tenggara Timur	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23
Kalimantan Barat	65,59	65,88	66,26	66,98	67,65
Kalimantan Tengah	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91
Kalimantan Selatan	68,38	69,05	69,65	70,17	70,72
Kalimantan Timur	74,17	74,59	75,12	75,83	76,61
Kalimantan Utara	68,76	69,20	69,84	70,56	71,15
Sulawesi Utara	70,39	71,05	71,66	72,20	72,99
Sulawesi Tengah	66,76	67,47	68,11	68,88	69,50
Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66
Sulawesi Tenggara	68,75	69,31	69,86	70,61	71,20
Gorontalo	65,86	66,29	67,01	67,71	68,49
Sulawesi Barat	62,96	63,60	64,30	65,10	65,73
Maluku	67,05	67,60	68,19	68,87	69,45
Maluku Utara	65,91	66,63	67,20	67,76	68,70
Papua Barat	61,73	62,21	62,99	63,74	64,70
Papua	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84
INDONESIA	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Lampiran 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2019

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	72.21	12.63	8.22	11 902	72.35
Tabanan	73.53	12.99	8.87	14 608	76.16
Badung	74.99	13.97	10.38	17 628	81.59
Gianyar	73.56	13.80	8.94	14 623	77.14
Klungkung	71.06	12.98	8.12	11 484	71.71
Bangli	70.37	12.33	7.16	11 369	69.35
Karangasem	70.35	12.40	6.31	10 302	67.34
Buleleng	71.68	12.91	7.08	13 780	72.30
Denpasar	74.68	13.99	11.23	19 992	83.68
BALI	71.99	13.27	8.84	14 146	75.38

Lampiran 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2018

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	71.91	12.61	7.95	11 666	71.65
Tabanan	73.23	12.96	8.64	14 245	75.45
Badung	74.71	13.95	10.06	17 325	80.87
Gianyar	73.26	13.71	8.92	14 376	76.61
Klungkung	70.70	12.95	7.75	11 318	70.90
Bangli	70.05	12.31	7.13	11 160	68.96
Karangasem	70.05	12.39	5.97	10 050	66.49
Buleleng	71.36	12.89	7.04	13 235	71.70
Denpasar	74.38	13.98	11.16	19 698	83.30
BALI	71.68	13.23	8.65	13 886	74.77

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2017

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	71.70	12.40	7.62	11 468	70.72
Tabanan	73.03	12.95	8.43	13 923	74.86
Badung	74.53	13.94	9.99	17 063	80.54
Gianyar	73.06	13.37	8.87	14 222	76.09
Klungkung	70.45	12.94	7.46	11 005	70.13
Bangli	69.83	12.30	6.80	10 956	68.24
Karangasem	69.85	12.38	5.52	9 833	65.57
Buleleng	71.14	12.62	7.03	12 995	71.11
Denpasar	74.17	13.97	11.15	19 364	83.01
BALI	71.46	13.21	8.55	13 573	74.30

Lampiran 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2016

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	71.57	12.27	7.59	11 343	70.38
Tabanan	72.89	12.87	8.10	13 800	74.19
Badung	74.42	13.66	9.90	16 567	79.80
Gianyar	72.95	13.36	8.86	13 766	75.70
Klungkung	70.28	12.86	7.06	10 852	69.31
Bangli	69.69	11.82	6.44	10 819	67.03
Karangasem	69.66	12.33	5.48	9 690	65.23
Buleleng	70.97	12.61	6.85	12 814	70.65
Denpasar	74.04	13.76	11.14	19 084	82.58
BALI	71.41	13.04	8.36	13 279	73.65

Lampiran 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2015

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	71.43	11.88	7.54	11 168	69.66
Tabanan	72.74	12.47	8.07	13 665	73.54
Badung	74.31	13.45	9.44	16 409	78.86
Gianyar	72.84	13.35	8.49	13 578	75.03
Klungkung	70.11	12.85	6.98	10 711	68.98
Bangli	69.54	11.36	6.41	10 649	66.24
Karangasem	69.48	12.11	5.42	9 556	64.68
Buleleng	70.81	12.37	6.77	12 587	70.03
Denpasar	73.91	13.75	11.02	18 849	82.24
BALI	71.35	12.97	8.26	13 078	73.27



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan, No. 1 Renon, Denpasar
Telp.: (0361) 238159, Fax: (0361) 238162
Email: bps5100@bps.go.id
Homepage: <http://bali.bps.go.id>

